



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KELAS LAYANAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA
(STUDI KASUS PADA SD NEGERI DUPAK I DAN
SD NEGERI BANYU URIP III/364)**

TESIS

WAHYU HARYADI

0906589671

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**JAKARTA
NOVEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
KELAS LAYANAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA
(STUDI KASUS PADA SD NEGERI DUPAK I DAN
SD NEGERI BANYU URIP III/364)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

WAHYU HARYADI

0906589671

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**JAKARTA
NOVEMBER 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Wahyu Haryadi
 NPM : 0906589671
 Program Studi : Adminitrasi dan Kebijakan Pendidikan
 Judul Tesis : Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas
 Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD
 Negeri Dupak I dan SD Negeri Banyu Urip III/364)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ

Penguji : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Sekretaris : Dr. Haula Rosdiana, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 November 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Wahyu Haryadi

NPM : 0906780671

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 November 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, kenikmatan dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai awal masa perkuliahan sampai ke penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag. rer.publ yang telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan dalam hingga selesainya penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu, Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA dan Dr. Haula Rosdiana, M.Si selaku Tim Penguji.
3. Seluruh dosen dan staff sekretariat Program Pasca Sarjana Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah banyak membantu dalam memberikan tambahan ilmu dan wawasan.
4. Ibu Eko Prastyoningsih, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Hari Prasetyo Hadi, Kepala Sekolah SDN Dupak I, Ibu Sri Utami, Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364 beserta jajaran guru pengajar KKK maupun guru non KKK yang telah memberikan waktu berharganya demi penyelesaian tesis ini.
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa mengenyam dan menyelesaikan pendidikan S2.
6. Istri saya Haniva Haryadi dan ketiga anak saya, Attar Zulva Reksa Soemarta, Nailan Alisha Keira Andjani dan Keenan Rhieva Reksa Soemarta atas pengertian, kepercayaan, kasih sayang dan dukungan doanya.

7. Keluarga Besar Reksa Soemarta, Kakak-kakak, keponakan yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
8. Rekan-rekan di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang telah memberikan doa dan dukungan.
9. Rekan-rekan di kelas pendidikan angkatan II.
10. Rekan-rekan sesama bimbingan tesis yang selalu saling mendukung.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat saya bisa menyelesaikan tesis yang sangat sederhana ini. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi yang memerlukannya.

2011

Jakarta, 14 November

Penulis

(Wahyu Haryadi)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Haryadi
 NPM : 0906589671
 Program Studi : Ilmu Adminitrasi dan Kebijakan Pendidikan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jenis Karya : Tesis

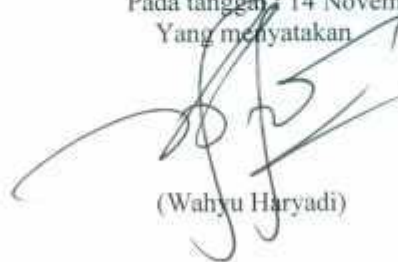
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD Negeri Dupak I dan SD Negeri Bayu Urip III/364) “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
 Pada tanggal : 14 November 2011
 Yang menyatakan

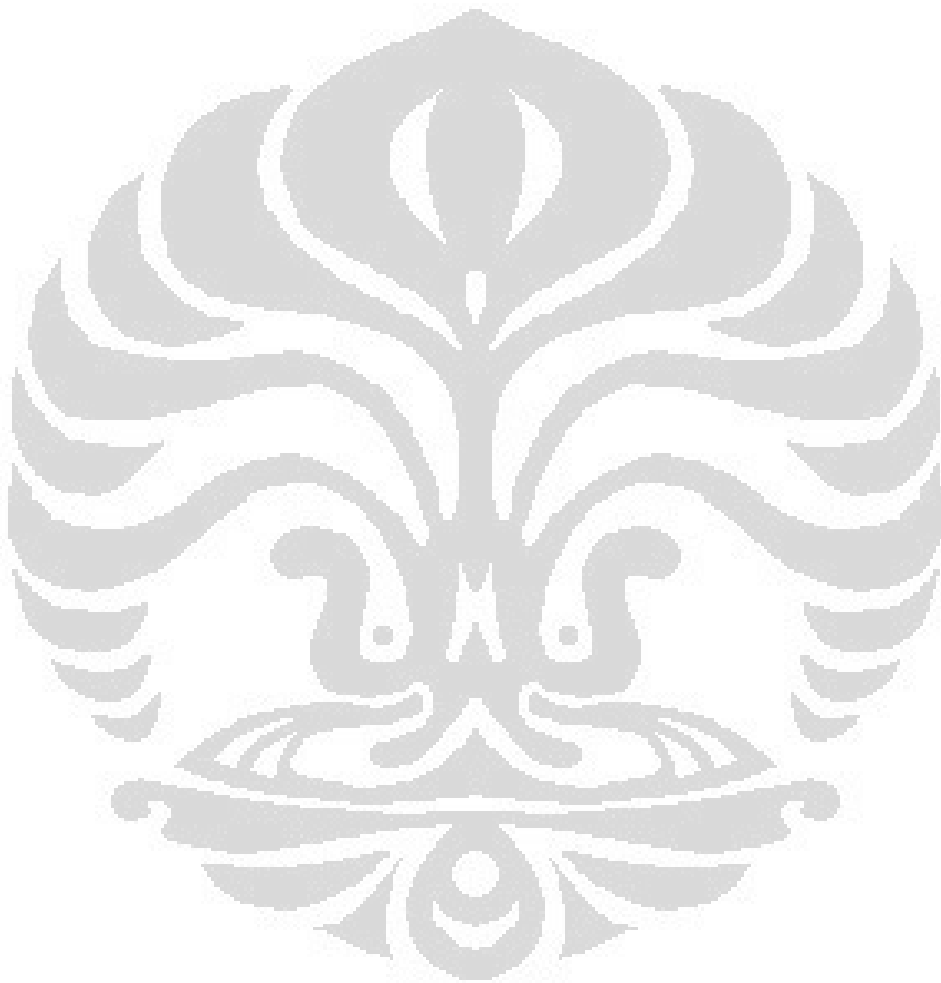


(Wahyu Haryadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kebijakan Publik.....	8
2.2 Kelas Layanan Khusus.....	12
2.3 Pendekatan Evaluasi.....	15
2.3.1 Model Evaluasi CIPP.....	16
2.3.1.1 Context evaluation to serve planning decision	16
2.3.1.2 Input evaluation, structuring decision.....	16
2.3.1.3 Process evaluation to serve implementing decision.....	17
2.3.1.4 Product evaluation to serve recycling decision..	17
2.3.2 Model Evaluasi UCLA.....	17
2.3.3 Model Brinkerhoff.....	18
2.3.4 Model Stake atau Model Countenance	19
2.3.4.1 Pendekatan Experimental.....	19
2.3.4.2 Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (Goal Oriented Approach).....	20
2.3.4.3 Pendekatan yang berorientasi pada keputusan (The Decision Focused Approach).....	20
2.3.4.4 Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (The User Oriented Approach).....	21
2.3.4.5 Pendekatan yang responsive (The Responsive Approach).....	22
2.3.4.6 Goal Free Evaluation.....	22
2.4 Operasionalisasi Konsep.....	25

BAB 3	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Pendekatan Penelitian.....	28
3.2	Jenis Penelitian.....	32
3.3	Jenis Data.....	28
3.3.1	Data Primer.....	28
3.3.2	Data Sekunder.....	29
3.4	Tempat dan Waktu Evaluasi.....	28
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6	Teknik dan Analisa Data.....	31
BAB 4	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KELAS LAYANAN KHUSUS.....	32
4.1	Profil Kota Surabaya.....	32
4.2	Profil Sekolah.....	35
4.2.1	SDN Banyu Urip III/364.....	35
4.2.2	SDN Dupak I.....	37
4.3	Program SD KKK.....	39
4.3.1	Pendekatan Dasar Program SD KKK.....	39
4.3.2	Tujuan dan Sasaran Program SD KKK.....	40
4.3.3	Pendekatan Pembelajaran.....	44
4.3.4	Berbagai Pendekatan dalam Pembelajaran.....	49
4.3.5	Pelaksanaan Pembelajaran KKK.....	55
BAB 5	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	65
5.1	Hasil Penelitian.....	65
5.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
5.2.1	Sosialisasi.....	95
5.2.2	Rekrutmen Siswa.....	95
5.2.3	Dana Bantuan.....	95
5.2.4	Kurikulum.....	96
5.2.5	Tingkat Keberhasilan.....	96
5.2.6	Hambatan.....	97
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
6.1	Kesimpulan.....	99
6.2	Saran.....	101
	DAFTAR REFERENSI.....	103
	LAMPIRAN.....	112



ABSTRAK

Nama : Wahyu Haryadi
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Judul Tesis : Evaluasi Program Pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya (Studi Kasus pada SD Negeri Dupak I dan SD Negeri Banyu Urip III/364)

Wajib belajar 9 tahun adalah salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah menargetkan anak usia 7-15 tahun harus bersekolah. Fakta yang ada adalah masih banyak masyarakat yang tidak dapat bersekolah di jenjang pendidikan dasar karena alasan ekonomi dan bahkan kemudian menjadi pekerja jalanan. Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah satu dari program pemerintah yang ditujukan memberi kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah. Program ini sudah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dengan menggunakan dana APBN, hanya kota Surabaya yang bisa melaksanakan dengan menggunakan dana APBDnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung yang ada di Kota Surabaya sehingga program SD KLK ini bisa dilaksanakan dengan baik. Program SD KLK di dua SD sampel di Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD ini juga bisa mengembalikan anak yang putus sekolah sebanyak 60 anak dan 30% diantaranya bias dikembalikan ke kelas regular. Diharapkan program ini bisa dikembangkan ke Kabupaten/Kota lain dengan menggunakan dana APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Pendidikan Dasar, Putus Sekolah, Kelas Layanan Khusus,

ABSTRACT

Namae : Wahyu Haryadi
Study Program : Special Aspects of Administration and Education Policy
Tittle : Evaluation of Special Education Service at Primary School.
(Case Study at Dupak I and Banyu Urip III/364 Primary Schools in Surabaya)

Nine year compulsory basic education is one of the priorities programme in Indonesia. The government targeted that all children age 7-15 years should go to school. In fact, many children are drop out and lives in the street due to economic problem. Special education service through providing special class is a program to enroll the street children in accessing education. This has been implementing in several districts including Surabaya City, the only district who provided local budget to support this program. This research aims to describe the implementation of the special class services at Dupak I and Banyu Urip III/364 primary schools in Surabaya. It is found that these schools succeed to enroll 60 out of school children and about 30% of them has been joined to the regular classes. It is recommended that this program could be implemented broader and supported by local governments.

Keywords: Basic Education, Drop Out, Special Class Service

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

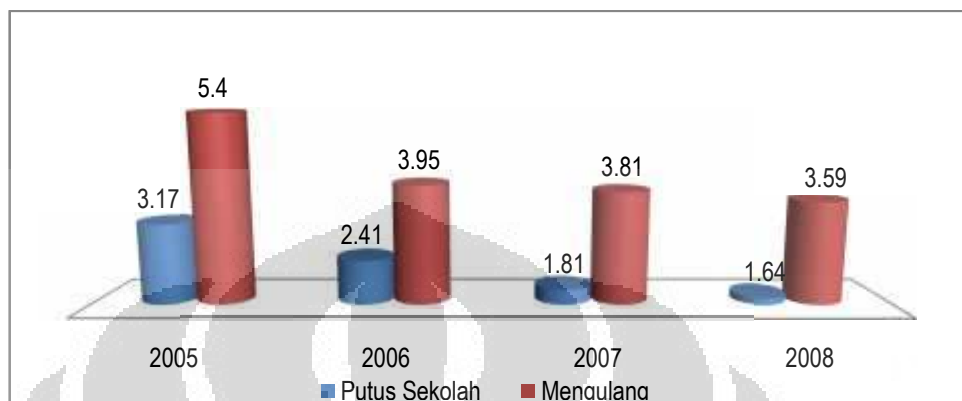
Salah satu kebijakan Bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia tertuang dalam ☐ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa *"untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial"* (Buku II Perbandingan UUD 1945, Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004, hal. 4)

Dan salah satu kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan layanan pendidikan. Selain itu akibat krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia, telah menimbulkan dampak pada peningkatan jumlah anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan Sekolah Dasar karena alasan ekonomi.

Beberapa alasan lain terjadinya kurangnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan antara lain adalah anak-anak harus membantu orang tua mencari nafkah. Data Pusat Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (2009) menunjukkan angka pekolah jenjang SD sebesar 475.145, atau sebesar 1,81 %. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 ☐ 2014, target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2014 adalah untuk angka pekolah jenjang sekolah dasar menjadi hanya 0,7%.

Grafik 1

Angka Mengulang dan Putus Sekolah Dasar Tahun 2005 □ 2008



Sumber PSP Kemdiknas 2009

Kebijakan dan upaya untuk menangani masalah sekolah telah menjadi perhatian dunia, dengan adanya tujuan UNESCO yang disepakati dalam Keangka Aksi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Educational For All (EFA)* tahun 2000. Deklarasi Dakar berisi enam tujuan PUS/EFA yang meliputi

1. Mempetuasd dan membaiki keseluruhan pnaan dan pendidikan anak usia dini, tuma ba gi anak-anak yng sangataa dan kurang berntung.
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak peempuan, anak -anak dalam keadaan sulit dan meeka yng emak minoritasetik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yng bebas dan wajib dengan kualitas baik.
3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan ong dea sa tepenuhi melalui akses yng adil pada gam -gam belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yng ssuai.
4. Mencapai pbaikan 50% ingkat melek aksan bagi ong dea sa menjelang tahun 2015, tuma bagi kaum peempuan, dan akses yng adil pda pendidikan dasa dan bekela njan bagi semua ong dea a.
5. Menghap disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai pe samaan gender dalam pendidikan

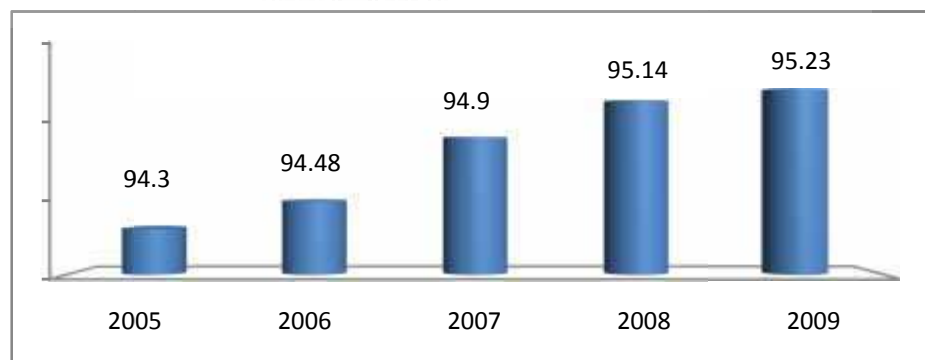
menjelang tahun 2015 dengan ~~at~~fokus jaminan bagi ~~peem~~puan ~~as~~akses penuh dan sama pada ~~pa~~si dalam pendidikan dasar ~~dengan~~ kualitas yang baik.

6. Mempebaiki semua ~~ap~~k kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan ~~en~~kudapat diaih oleh semua, ~~et~~ama dalam keaksanan, angka dan kecakapn hidup (*life skills*) yang penting.

Pemeintah Indonesia memfokuskan pada ~~tr~~apainy pementan dan petuasan pendidikan yang bemtu ~~u~~gardapatmenjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, termasuk anak ~~peem~~puan, anak -anak yang kurang berntung dan minoritas ~~et~~nik, mempunyai akses yang sama dan ~~dap~~t menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan ~~aj~~ib dengan kualitas yang baik. Hal ini didukung oleh UUD 1945 dengan ~~jia~~ pasal 31 tentang hak setiap ~~pa~~ngamegan untuk ~~mempe~~oleh pendidikan. Begitu juga ~~sepi~~ terantum dal ~~am~~ UU No2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ~~ast~~5 yang ~~beis~~ bahwa setiap ~~pa~~ng Negan mempunyai kesempatan yang sama ~~mempe~~oleh pendidikan, ~~se~~ UU No. 20 tahun 2003, tentang ~~aj~~ib belajar pend ~~idikan~~ daa ~~ar~~9 tahun. Semua itu ~~me~~pkkan berbagai ~~a~~ha pmeintah untuk ~~membe~~ikan pementan kesempatan belajar bagi semua anak. Pencanangan ~~pelaksanaan~~ ~~gam~~ ~~aj~~ib belajar ~~ar~~9 tahun sebagai komitmen pemerintah ~~thead~~apeningkatan ~~mt~~sumber daya manusia melalui pendidikan. ~~Pog~~am penuntasan ~~aj~~ib belajar ~~ar~~9 tahun diagekan ~~tunt~~aspada tahun 2008, dengan ~~aget~~pencapaian Angka Patsipasi Mn ~~i~~ (APM) jenjang Sekolah Dasar ~~besar~~ 99.9%.

Grafik 2.

APM SD/SDLB/MI/Paket A/Sederajat Tahun 2005 - 2009



Sumber PSP Kemdiknas 2009

Angka Partisipasi Masi merupakan akumulasi dari partisipasi anak usia 7-12 tahun pada semua jenis pendidikan di sekolah dasar, MI, SDLB, pondok pesantren Salafiyah Ula, dan Paket A.

Angka Partisipasi Masi SD/SDLB/MI/ Paket A/ Sederajat secara nasional meningkat dari 94.30% pada tahun 2005 menjadi 95.23% pada tahun 2009. Pencapaian APM ini telah melampaui target yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pembeantasan Buta Aksara yaitu sebesar 95% namun belum bisa mencapai target APM 99,9% pada tahun 2008.

Dalam angka pencapaian target tersebut, sebagai upaya pemenuhan akses dan pemertaan kesempatan belajar telah dilakukan melalui penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak. Salah satu upaya tersebut adalah memaksimalkan penarikan kembali siswa sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan melalui Kelas Layanan Khusus. (Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, hal 50)

Tabel 1
Program Perluasan dan Pemertaan Akses Pendidikan SD/SDLB

No.	Program	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah ruang kelas yang rusak	465.356 (46,62%)	393.247 (39,40%)	299.378 (29,99%)	201.856 (20,22%)	88.155 (9,89%)
2	Penerima Beasiswa dan Beasiswa Siswa Miskin	70.000	53.920	52.171	698.570	1.796.800
3	BOS *)	3,394**)	6,832**)	6.617	6.823	10.682
4	Siswa Peserta KLK	675	1.145	1.895	2.500	2.500
5	Pembinaan SD Tepencil	66	66	66	66	-

Catatan: *) Trilyun rupiah ; **) Termasuk MI dan Salafiyah Ula

Sumber Direktorat Pembinaan TK dan SD Kemdiknas 2009

Sebagai aplikasi Kelas Layanan Khusus (KLK), maka Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan suatu model layanan pendidikan untuk menangani anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau sekolah yang disebut dengan Program Kelas Layanan Khusus (KLK) di Sekolah Dasar. Program ini dilahirkan dari hasil studi pendahuluan pada tahun 2002 di beberapa kota besar di Indonesia oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu: Universitas Terbuka, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2003 program Kelas Layanan Khusus mulai diujicobakan di 15 Kota, yaitu: Medan, Palembang, Serang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Pemilihan kota-kota tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa: (a) kota-kota tersebut merupakan kota-kota besar yang terdapat banyak kaum urban mengadu nasib; (b) kota-kota tersebut telah dikaji dan hasilnya menunjukkan terdapat banyak anak-anak usia SD yang tidak sekolah atau telah dipetakan kebendaannya untuk diangani; (c) Angka Partisipasi Murni jenjang SD di kota-kota tersebut menunjukkan angka yang masih rendah. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif layanan pendidikan yang sangat handal dalam angka menjangkau jutaan anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau sekolah.

Karena keterbatasan anggaran dana, maka Kementerian Pendidikan Nasional mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dengan didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, upaya ini pernah dilakukan dengan mengundang Bappeda Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program pembelajaran SD KLK pada acara Workshop SD KLK di Bali pada tahun 2006. Namun hingga saat ini baru Kota Surabaya yang bisa melaksanakan model pembelajaran SD Kelas Layanan Khusus menggunakan dana APBDnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penyusunan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program KLK di Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD, perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Oleh sebab itu proposal ini diajukan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLK bagi anak usia 7-12 tahun di Sekolah Dasar Negeri di

Kabupaten Subang yang menggunakan dana APBD. Dalam pelaksanaannya program KLK memiliki banyak komponen yang terkait komponen-komponen tersebut antara lain: (1) Proses belajar mengajar; (2) Guru; (3) Peserta didik; (4) Metode mengajar; (5) Kurikulum; (6) Media pembelajaran; (7) Evaluasi belajar. Untuk menghasilkan evaluasi yang sesuai dengan permasalahan dalam program KLK, maka masalah evaluasi dibatasi pada: (1) jenis evaluasi program menggunakan model CIPP, yang meliputi kajian tentang *Contexts, Inputs, Process, dan Product*. Model CIPP ini digunakan untuk memfokuskan dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang efektivitas penyelenggaraan program Kelas Layanan Khusus (KLK); (2) objek penelitian dibatasi pada penyelenggaraan program KLK di Kabupaten Subang yang menggunakan dana APBD; (3) jangka waktu pelaksanaan evaluasi dibatasi pada penyelenggaraan program KLK periode tahun 2007-2009.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka masalah penelitian dirumuskan sesuai pendekatan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dengan menggunakan dana APBD
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dengan menggunakan dana APBD

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas), pemerintah harus mampu menjamin semua anak Indonesia di usia 7 – 15 tahun agar bisa bersekolah. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan program pendidikan kelas layanan khusus di Kabupaten Subang dengan menggunakan dana APBD, sejauh mana program ini berdampak atau minimal memberikan kontribusi bagi penuntasan

Wajar. Dikalaupun pun, angka putus sekolah, sehingga penulis dapat mengetahui :

1. Mengevaluasi sejauh mana program pendidikan ini terhadap penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
2. Mengevaluasi implementasi program dari segi perencanaan program, segi pelaksanaannya dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program,

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil evaluasi program ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian secara akademik, sosial dan praktis:

1. Manfaat Akademis

Penulis berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademik mengenai pemahaman tentang program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya program pendidikan kelas khusus.

2. Manfaat Praktis

Penulis berupaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam pengentasan angka putus sekolah maupun angka penuntasan wajib belajar sembilan tahun sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak ada anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah maupun putus sekolah. Penulis berupaya memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pendidikan kelas khusus, khususnya di Kota Surabaya kepada masyarakat agar lebih paham sekaligus juga bisa membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak yang *drop out* untuk melanjutkan pendidikan di tingkat dasar dan memperkuat komitmen orang tua dalam tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Penulis juga berupaya bisa memberikan umpan balik bagi berbagai stakeholder tentang dampak pelaksanaan program serta sebagai dasar perencanaan untuk program selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu yang sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kebijakan publik dapat dianalisis, dievaluasi, dan diimplementasikan dengan baik-buruk. Sebagai salah satu kebijakan yang sudah biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, nampaknya penggunaan kebijakan publik dalam kegiatan masyarakat yang berbeda-beda (Charles O Jones 1984, p.25)

Secara umum, pengertian kebijakan publik dikenalkan oleh James A. Anderson (1978, p. 3) yakni *"Public policies are those developed by governmental bodies and officials"*. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Sedangkan David (1972, p.1) bahwa kebijakan publik adalah *"whatever governments choose to do or not to do"*, atau dalam pengertian lain, kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat yang hampir senada dikenalkan oleh Dunn (1994, p.1), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *"a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official"*. Pengertian Dunn dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan edepan berbagai hal dengan berdasarkan sifat, bentuk, dan sifat keagamaan, dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, dan mungkin juga oleh lembaga pemerintah secara keseluruhan. Demikian juga Easton (1953, p.129) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*

Bedanya dengan Dunn dan Easton, George (1992, p. 5), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah *"an attempts to resolve public issues, question that most people believe should be decided by officials at the appropriate level of government national, state or local"*. Pendapat George tentang kebijakan publik lebih menekankan kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap

tingkatan pemerintahan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Parker (1975, p.70), bahwa kebijakan publik adalah suatu pernyataan yang dapat dilaksanakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya pada suatu periode tertentu dengan suatu kebijakan yang ditetapkan.

Secara Laswell and Kaplan (1970, p.71) mendefinisikan kebijakan sebagai: *a plan of goals, values, and practices* dan Friedrich (1963, p.70) bahwa *"it is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purposes"*. Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Wilam Jenkinson dalam bukunya *Policy Analysis: A Political and Organization Perspective* yang dikutip oleh Houtart Ranaivosoa (1995, p.5) bahwa kebijakan publik adalah *"a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principal, be within the power of those actors to achieve"*.

Jones (1984, p. 47) yang dikutip oleh Eula dan Perwit berpendapat bahwa hampir sama dengan Jones dengan mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu yang diciptakan oleh pemerintah yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu yang dapat diukur dan diukur. Jika Eula dan Perwit menekankan pada pencapaian tujuan, maka Edward III dan Shaker (1978, p. 23) berbeda. Dikemukakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program pemerintah yang akan dilaksanakan.

Nakam dan Samuelson (1980, p. 31) hampir sama dengan Eula dan Perwit, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga Permana dan Wilay (1984, p. xii) berpendapat bahwa kebijakan sebagai: *a hypothesis containing initial condition and predicted consequences*. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diukur.

Secara mendasar beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa pandangan mengenai kebijakan publik terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang memandang kebijakan publik sebagai suatu tindakan atau apa-apa yang sebenarnya dilakukan. Kedua, kelompok yang menekankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kaidah.

Pendapat yang pertama menekankan bahwa terhadap kebijakan sebagai tindakan seorang pejabat atau penguasa, kelompok kedua menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan publik. Para ahli yang benda pada kelompok ini di antaranya Anderson, Parker, Gibson. Sedangkan kelompok kedua yang memandang kebijakan publik sebagai suatu kaidah atau norma kelompok yang dibuat oleh para ahli kebijakan. Para pakar kebijakan publik yang benda pada kelompok kedua di antaranya Easton, Dunn, Dye, Shaker dan Perelman dan Willey. Pandangan kedua ini lebih dikenal sebagai *Predictable impacts*.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat pakar kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kaidah atau norma yang dibuat oleh individu, lembaga atau pemerintah mengenai suatu perilaku atau tindakan yang akan dilakukan, dilaksanakan, dan diawasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Kebijakan publik yang sudah dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Kebijakan publik yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan dampak yang negatif bagi masyarakat (Riat Nugroho, 2009).

Salah satu kebijakan merupakan bagian terbesar dari suatu proses kebijakan, sehingga apabila suatu kebijakan tersebut tidak berhasil maka dapat dikatakan kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. George Edward III (1980,1) mengatakan bahwa salah satu administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakan lagi *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan

jadi efek, yaitu *cutting off* dan *bureaucratic inertia*

Model implementasi kebijakan yang paling banyak dikenal adalah model yang dipekenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan merupakan linear dari kebijakan publik, implementasi kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan adalah variabel berikut

1. Aktivitas dan komunikasi organisasi
2. Karakteristik pelaksana
3. Kondisi eksternal dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementasi

Model implementasi kebijakan yang lain adalah model Merilee S. Grindle (1980). Dikenal oleh Wibawa (1994, 22) model Grindle diteliti *isi* kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa sebuah kebijakan dilaksanakan, bahwa implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pelaksana kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang dibutuhkan

Faktor-faktor implementasi kebijakan adalah :

1. kekuasaan, kepentingan, dan tegi yang terlibat
2. Karakteristik dan pengaruh
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini jika kita cermati adalah merupakan yang paling efektif akan pelaksanaan kebijakan, khusus yang berkaitan dengan implementasi penerimaan implementasi, dan akan konflik yang mungkin terjadi

diatas paa abipenis, st kondisi -kondis berday ipenis
yg diptkan.

Dar sm nian diatas tag ipenis kebijakan pels akan
mnggakanndelGrindle kaena ndelGri dle inihh yg palng ssai dalam
emeli ndelpelpehjianSehh DaarKehsLayanKhusudi Kota Sabay.
Fak phuat kebijakan, amfaat yg akan diabil kepeingan kenjian
pendidikandi Kota Sabay, keptuhansehh dalamnak n gam
pendidikarkehsLayanKhusudi nidi falyg emetikarkbehggan
darkebehaian SD KehsL ayanKhusudi Kota Sabay sbagai pay h
am unkan agk p seh, ketsediaan dan ketangkaan hyanan
pendidikan, petanwajib beharshianhun danpendidikansema
(ducatifall)

2.2 Te□□ting Keh□□layan Kh□□□□

PoganKehs Layan Khusud (KLK) pada dasa upkansatu
pendidikarkhusudina pendidikarkhusudsing diiditkanlegarpendidikan
bagi ank bekehanan, yg dihhkan scan khusud Ithh pendidikan
bekehanan beaakan bebagai lenti digolongkan dalampe ndidikan yg
miki bakatuarbias aupeyntag cacat Bebeapa ahli pgi pendidikan
tth bayleberkihah pendidikarbagi anak yg miki kehanan, spei
ndelpendidikanikf aundelpndidikansegaif. Pendidikanba gi anak
bekehanansehm ini disenggaakscan khusudi Sehh LuarBiaa (SLB).
SLB alipatupendidikanTamKanak -kanakLarBiaa, Sehh DaarLar
Biaa, Sehh LajmTingkatPetamLuarBiaa, darSehh Meangah Luar
Biaa.

Peningkataphatathadapankbekehanandapatdiikkukandegaraan
mberikarkespatarkepada anakbekehananbehh di seh mdan
behar beam -sam anak m distai dengan penbggaan pehyanan
pendidikan yg ssai deng arkeadaandarkebutuhannak, yg dikealdengan

istih pendidikan. Sehingga anak-bekehinandi aping dapat angik pendidikan di SLB, dapat angik pendidikan di SLB di Halini sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang akan himakarbahwa pendidikan khusus (dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional istih pendidikan khusus disebut dengan istih pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi anak-bekehinandi yang disanggakan secara istih di SLB atau benpa atau pendidikan khusus. Melalui pendidikan istih, anak-bekehinandi dididik bersama-sama anak lain (anak normal) dalam lingkungan yang diistih. Hal ini diistih bahwa di dalam lingkungan anak-bekehinandi hidup bersama-sama anak lain, yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, melalui pendidikan istih anak-bekehinandi ini dapat diberikan kesempatan belajar dengan anak-anak lain.

William Stainback mengemukakan dalam bukunya (*Coval Is C6 Special Education* 1992:29) bahwa yang diistih dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang angik siswa di kelas yang sama. Pendidikan khusus dapat memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-bekehinandi sehingga anak-bekehinandi dapat angik pendidikan yang layak tetapi terpisah dari anak-anak lain. Pendidikan khusus juga dapat dapat diistih sebagai bagian dari kelas, sehingga siswa dapat angik dengan anak-anak lain.

Sedangkan Staub dan Peck dalam bukunya (*Education Leadership :1995;36-40*) mengemukakan secara lebih lanjut bahwa pendidikan istih adalah penempatan anak-bekehinandi ke dalam lingkungan, sedang, dan berat yang penuh di kelas reguler. Penempatan siswa bekebutuh khusus dengan siswa normal (reguler) diistih dapat dapat cepat dan baik bagi siswa bekebutuh khusus. Hal ini skalga angik bahwa kelas reguler

Sesuai sebagai pendaptan pendidik khusus anak dengan disabilitas, pendidikan khusus diarahkan untuk anak berkebutuhan khusus di kelas reguler atau dengan cara lain (jika penuh), karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat di kelas khusus atau tapi berhubungan dengan kekinan yang lebih. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak kekinan yang lebih baik atau berada di kelas khusus pada sekolah reguler (jika bisa). Kemudian, bagi yang tidak kekinan yang lebih baik dan tidak mungkin untuk sekolah reguler (sekolah biasa), dapat dimasukkan ke sekolah khusus (SLB) atau ke rumah sakit).

2.3 Pendekatan Evaluasi

Pada dasarnya banyak model evaluasi yang digunakan untuk program evaluasi. Dalam evaluasi program pendidikan, banyak model yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Menurut Wahyuni (2011) ada beberapa model evaluasi yang berbeda, memiliki tujuan dan jenis yang berbeda-beda. Kegiatan pengumpulan atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang dilakukan bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindakan yang akan diambil.

Evaluasi program yaitu evaluasi yang menyangkut kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan pada siswa dan staf. Menurut (Jaito, 1991, p. 13) "Berdasarkan beberapa hal ini memberikan beberapa jenis yang baik sesuai dengan kebutuhan kita. Metode yang dipilih hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi tempat. Menurut Stufflebeam (1983) ada beberapa variasi model dalam evaluasi, di samping desain penelitian kuantitatif ada juga dengan model kualitatif (Guba dan Lincoln, 1989), yang didasarkan pada analisis yang sudah lebih dahulu dipakai dalam evaluasi. (Fairda Yusuf Tajib, 2011: 7) Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh ahli atau pakar. Model evaluasi yang biasanya didasarkan pada kebutuhan atau harapan. Model evaluasi yang lebih di anggap lebih lanjut atau

Bagaimana prosedur pencapaian. Pada fase ini evaluasi terhadap
 apakah terdapat yang ada dalam upaya pencapaian dan dari
 evaluasi itu. Dengan hasil dari evaluasi dapat menentukan
 'apakah' pengambil keputusan yang berkenaan dengan
 akan dilakukan.

2.3.1.3 *Process evaluation, to serve implementing decision*

Evaluasi proses mengidentifikasi. Sampai
 sejauh mana rencana telah ditetapkan? Apa yang harus revisi? Begitu para
 terdapat, prosedur dapat dimodifikasi dan diperbaiki. Pada fase ini evaluasi
 hendak dapat mengungkapkan sejauh mana proses yang telah
 ditetapkan dengan upaya apa yang dapat ditempuh agar dapat
 pengambil keputusan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

2.3.1.4 *Product evaluation to serve recycling decision.*

Evaluasi produk mengidentifikasi. Apa hasil yang telah
 dicapai? Apa yang diukur setelah pelaksanaan? Pada fase ini evaluasi
 mengungkapkan sejauh mana kebutuhan pelaksanaan telah terpenuhi
 dan menentukan upaya apa yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari
 program yang bersangkutan.

Huruf pertama dari evaluasi dijadikan angka CIPP, model ini
 dikenal dengan nama model CIPP oleh Stufflebeam.

2.3.2 Model Evaluasi UCLA

Alkin dan Stake, ketika mereka evaluasi yang hampir sama dengan
 model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses yang
 dapat, untuk informasi yang tepat, dan menganalisis informasi
 sehingga dapat menghasilkan yang berguna bagi pembuat keputusan
 dalam berbagai alternatif yang akan dilaksanakan, yakni:

- 1) *System assessment*, memberikan informasi tentang keadaan sistem
- 2) *Programm planning*, menetapkan program yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan
- 3) *Programm implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah dipekanakan pada ke program yang diterapkan.
- 4) *Programm improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program berkembang, atau berubah? Apakah pencapaian tujuan, adakah hal-hal yang baik dan yang tidak?
- 5) *Programm certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program

2.3.3 Model Birkhoff

Setiap desain evaluasi terdiri atas elemen-elemen yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Birkhoff & Cs(1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang dibedakan berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang ada seperti evaluasi evaluasi tinggi, rendah dan lain-lain.

- 1) *Fixed vs Emergent Evaluation design*. Apakah evaluasi dan kriteria akhir yang diperlukan? Apabila demikian, apakah itu sat keharusan?
- 2) *Formatif vs Summatif Evaluation*. Apakah evaluasi akan digunakan untuk perbaikan atau hanya untuk mengukur manfaat suatu program atau kedua-duanya?
- 3) *Eksperimental and Quasi Eksperimental Design vs Naturalistic Inquiry*. Apakah evaluasi akan dilakukan intervensi dalam kegiatan program untuk mencoba berbagai kondisi yang diperlukan, atau hanya diamati, atau kedua-duanya?

2.3.4 Model Stake atau Model Cennce

Stake, analisis evaluasi yg ditentukan oleh dampak yang disebabkan oleh program ini dan tidak ada yang sederhana namun akan lebih kuat penguatannya lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan dua dasar kegiatan evaluasi ialah *Design* dan *Judgment* berdasarkan tiga tahap dalam pendidikan yaitu: *Antecedents* (Context), *Transaction* (Process), dan *Outcomes* (Output).

Model *Description* menekankan *Intens* (Goals) dan *Observation* (Effects) atau yang sering terjadi. *Judgment* ini dua aspek yaitu *Standard* dan *Judgment*.

Stake mengatakan apabila kita memilih satu program pendidikan kita, lakukan perbandingan yang efektif antara program yang lain atau perbandingan yang absolut (program yang standar). Penekanan yang utama yang penting dalam hal ini adalah bahwa evaluasi yang dibuat penilaian yang program dievaluasi. Stake mengatakan bahwa desain di setiap hak berbeda dengan *Judgment* yang kita pilih. Dalam model ini *Antecedents* (sebelum), *Intens* (proses), dan *Outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya kuantitatif, tetapi ada perbedaan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk manfaat Stake mengatakan bahwa tidak ada evaluasi dapat diandalkan apabila tidak diuji.

Pendekatan evaluasi dipakai untuk memberikan petunjuk bagaimana memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi. Semua pendekatan paling tidak mempunyai jawaban tentang bagaimana memperoleh informasi yang benar atau dapat diandalkan. Namun demikian dalam hal ini ada perbedaan penekanan pada aspek tertentu dalam hal pendekatan, analisis dan interpretasi. a.

2.3.4.1 Pedektan Eeenl

Yang diadopsi dengan pendekatan eperanal yaitu evaluasi yg bersifat pada penggunaan eperanal science dalam ps evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kepekerjaan yg biasa dilakukan dalam evaluasi akademik. Tujuan evaluatadaah kepekerjaan yg bersifat mengungkap atau grametn yg ngb sbank -bank fact dan angibis penganh gam Evaluab berha skuatnaga menggunakan de aitifile sbank kin.

2.3.4.2 Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Can yg plng bgis keanekaragaman hayati dan jumlah jarkhusus dalam kegiatan lapangan. Lncapi ti jarkesbut. Hal yg amjuga dipebh pada tchis jarkpada evalais. Pendekatan ini amkai jarkpgamsbagai kera kumetikan kebehain. Evaluabon coba amkspai diama pencapaianjark eh dicapai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan pengalaman yang dialami oleh responden. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman yang dialami oleh responden dalam menggunakan aplikasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang melingkupi pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi perilaku responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi sikap responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi persepsi responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi motivasi responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi loyalitas responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi rekomendasi responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi perilaku responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi sikap responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi persepsi responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi motivasi responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi loyalitas responden. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi rekomendasi responden.

2.3.4.3 Pendekatan yang berfokus pada keputusan (The Decision Focused Approach)

Pendekatan nilai yang berfokus pada kemampuan pada penerapan informasi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna apabila dapat membantu pegebel program dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, kegiatan evaluasi harus mencakup kegiatan sesuai dengan kebutuhan keputusan program. Pengumpulan data dan informasi dibuat dalam bentuk efektif aspek program.

Sehingga program ini benar-benar beroperasi dari awal sampai akhir kebutuhan program yang tingkat penerapannya, pembuatan program akan informasi yang masih dalam kapasitas analisis. Sehingga tingkat informasi administrasi akan informasi yang sudah ada.

Bila program selesai, keputusan yang penting akan dibuat berdasarkan hasil yang dicapai. Sebagai akibat evaluasi harus mengetahui dan mengerti pekebalan program dan hasil yang diadarkan berbagai macam -macam informasi pada berbagai macam -macam waktu. Ideanya program dan sistem evaluasi dikehendaki agar hal ini tidak dapat terjadi. Maka harus ada evaluasi di akhir evaluasi setelah program berjalan.

2.3.4.4 Pendekatan yang berorientasi pada pengguna (The User Oriented Approach)

Sejak tahun 1970-an, evaluasi merupakan suatu pendekatan hampir sama yang dibiasakan untuk menilai program. Para evaluator tidak hanya baik yang merasa puas atas hasil yang dicapai. Tetapi dalam hal ini diakibatkan dari hasil yang dicapai -ka yang sedikit sekali berpengaruh terhadap program yang akan evaluasi. Walaupun evaluasi telah dilakukan sejauh ini, namun belum tercapai, tetapi hasil tidak seperti yang direncanakan.

Sebagai jawaban atas hal tersebut, para peneliti ini melihat bahwa evaluasi mereka ini akan membuktikan -bukti empiris yang akurat pada penggunaan informasi. Sehingga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil akan,

terkait dengan pegawai keipn, keipn waki

informasi, dan sikap terhadap teknologi. Lebih

-lebih lagi

ketertarikan yang penting dalam

perkaiareva lias.

Karena banyak -faktor dapat dipengaruhi oleh penilaian

penelitian yang pendektar banyak mencakup haspenkaian

informasi. Hal ini disebut peningkatan *The User Oriented* *sp* *ap* *yg*

dibandingkan, pemerintah ini informasi yang disediakan yang lebih banyak

2.3.4.5 Pedekatan yang revesi (The Responsive Approach)

Pendekatan ini ~~emp~~ -pendekatan yang paling hindar, kelampendekatan

dahulu ini, karena pelek dahulu ini

Evaluasi ini berasumsi bahwa evaluasi yang benar-benar mencari

pengetahuan dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat

yg beibatdang bekepeingandegamgramEvaluatidak peray

ada satu bank yang nilai asetnya dapat dihindarkan

ankai tes kuesioner atau analisis statistik. Tapi setiap yg dipeganhi

dan gametifikasi. Secara unik dan evaluasi mencoba meng

yang menghubungkan dengan kita atau mengaitkan

penelitian pandangan ~~nya~~ ~~dan~~ ~~tersebut~~. Tujuan evaluasi adalah

berbeda-beda dan mengalami berbagai sudut pandangan.

bebeda.

Evaluasi terhadap pendekatan yang berbeda dalam melakukan evaluasi

dandannan tahu dinarka paniss. Evaluasi ef diandai dengan

cir-cir evaluasi yg kualitatif, nalar, bukan kualitatif. Bukan

menghantui dengan ketakutan tetapi tidak takut

yang harus dilakukan terhadap data yang

ipsonisk.

2.3.4.6 Goal Free Evaluation

Alasan mengapa evaluasi Goal Free Evaluation (evaluasi bebas tujuan), dapat dilakukan sebagai bentuk Tujuan pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai pemberian, seperti tujuan biasanya atau hanya berdasarkan indikator yang sebenarnya dari pelaksanaan benbail. Lagi pula, baik hasil program yang tidak sesuai dengan tujuan program ini, sehingga pada vocational pendidikan akan menciptakan lapangan kerja baru, hasil yang diinginkan tetapi tidak pernah menghasilkan lapangan kerja. Scriven percaya bahwa fitur evaluasi bebas tujuan adalah untuk menghindari bias dalam arah objectifitas

Dari berbagai metode di atas dapat diketahui bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan, kita bedakanlah berbagai tipe evaluasi tersebut, maka metode evaluasi yang sesuai dengan jenis evaluasi program CLK yang akan dilakukan adalah metode CIPP dari Stufflebeam dan Shinkfield. Adapun berbagai pertimbangan yang menjadi dasar penentuan metode tersebut adalah: (1) Metode ini memiliki langkah-langkah yang jelas dan terdapat pengungkapan tahapan program (2) Metode CIPP dapat menganalisis secara detail dari perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan keberlanjutan. (3) Model CIPP ini merupakan salah satu yang paling banyak dikenal dan diterapkan pada evaluasi dibandingkan dengan model-model lainnya. Model CIPP ini yang merupakan sebuah singkatan dari huruf aalepat buah kata, yaitu:

<i>Context evaluation</i>	: evaluasi terhadap konteks
<i>Input evaluation</i>	: evaluasi terhadap sumber daya dan
<i>Process evaluation</i>	: evaluasi terhadap proses
<i>Product evaluation</i>	: evaluasi terhadap hasil

Keempatnya tersebut merupakan evaluasi yang tidak termasuk komponen dari proses sebuah program kegiatan. Oleh sebab itu model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program dievaluasi sebagai sebuah sistem

Dalam pelaksanaan evaluasi ini Staff beasiswa menghadapi empat aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. *Context evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini adalah untuk mengetahui kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan untuk program.
 2. *Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini untuk mengetahui, menentukan berapa yang ada, apakah apa yang diambil apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapai.
 3. *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses ini untuk mengetahui proses yang berjalan. Sampai sejauh apa rencana telah ditetapkan? Apa yang harus dievaluasi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimodifikasi dan diperbaiki.
 4. *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk ini untuk mengetahui apakah yang telah dicapai? Apa yang dilakukan telah program berjalan?.
- Bedasarkan hal-hal tersebut maka perlu akan meng evaluasi program tersebut berdasarkan komponen-komponen. Komponen-komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk mengidentifikasi lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan apa yang dihadapi, dan untuk perbaikan.

2. Evaluasi Mekanisme

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi mekanisme. Mekanisme dari evaluasi mekanisme adalah kemampuan awal siswa dalam mengikuti program atau kemampuan dalam menjalankan tugas yang tepat dan sebagai. Menurut Staff beasiswa yang berkenaan dengan mekanisme

menyentuh pada "pelembagaan" yang mendorong diselenggarakan program sejenis.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP meliputi "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dan "siapa" (*who*) yang dianggap sebagai penanggung jawab program "kapan" (*when*) kegiatan dilaksanakan. Dalam model CIPP, evaluasi proses dilakukan pada setiap tahap kegiatan yang dilakukan dalam program dan teknik sesuai dengan rencana.

4. Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi produk atau hasil dilakukan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada program. Evaluasi produk dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program.

Beda dengan evaluasi dalam model CIPP tersebut maka dalam upaya mengukur evaluasi terhadap Program Khas Layanan Khusus model CIPP tepat digunakan sebagai alat evaluasi program Khas Layanan Khusus di Kota Surabaya.

2.4 Kesimpulan

Evaluasi terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Dasar Khas Layanan Khusus sesuai dengan model evaluasi CIPP dan juga model kebijakan dari Meiree S. Grindle harusnya mengungkapkan bagaimana kebijakan dibuat oleh siapa saja, kriteria mana yang berperan dalam kebijakan tersebut, berdasar yang digunakan, kepuasan dan daya tanggap dari para pelaksana kebijakan. Sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari model kebijakan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang akan dihimpun akan dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan-pandangan dari subjek penelitian sehingga bisa diungkapkan faktor-faktor keunggulan apa yang membuat Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa melaksanakan model program pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus sementara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lain tidak bisa melaksanakan, bagaimana implementasinya, mengetahui keunggulan dan kelemahan pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya, serta mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya secara menyeluruh baik dari segi konteks, input, proses dan produk.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan model analisis evaluasi dengan pendekatan metode kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan akan dicoba untuk diolah dan disajikan dalam deskripsi berdasarkan ungkapan, bahasa cara berpikir dan pandangan-pandangan subjek penelitian sehingga diharapkan akan dapat diketahui sejauhmana faktor-faktor yang ada di lingkungan Kota Surabaya baik pada Dinas Pendidikannnya, aparat dibawahnya dan pengaruh dukungan dari masyarakat yang membuat program Kelas Layanan Khusus bisa berjalan di wilayah Kota Surabaya.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer yang digunakan akan diambil oleh penulis secara langsung pada obyek penelitian (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sampel sekolah penyelenggara, masyarakat) atau data yang diambil dari

penelitian sebelumnya. Data akan berbentuk transkrip wawancara dengan para responden terkait, catatan-catatan yang mendukung penelitian ini dan lain sebagainya

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan akan diambil dari cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Data ini bisa diambil dari buku-buku tentang anak putus sekolah, pelaksanaan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus pada Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan sebagainya. Dengan menggunakan studi kepustakaan ini diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah dan lebih sistematis.

3.4 Tempat dan Waktu Evaluasi

Tempat pelaksanaan evaluasi implementasi program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus ini adalah di Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek penelitian adalah 2 (dua) sekolah dasar yang menyelenggarakan program Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya yang menggunakan dana APBD Kota Surabaya. Waktu evaluasi implementasi program ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan beragam fakta yang berhubungan dengan masalah evaluasi program. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam evaluasi ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, teknik angket dan wawancara.

(1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi

penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi mencakup keadaan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus yang ada pada 2 sekolah penyelenggara program kelas layanan khusus di Kota Surabaya.. Selain itu, dikumpulkan pula bahan-bahan tertulis yang berupa data akademik, pembiayaan, serta laporan-laporan pelaksanaan kegiatan Kelas Layanan Khusus dari setiap lokasi penelitian. Data tersebut merupakan bahan deskripsi maupun bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

(2) Wawancara

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara yang bersifat "unstructured", yaitu wawancara yang terfokus pada suatu masalah tertentu (*focused interview*) dan wawancara bebas (*free interview*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berpindah-pindah dari satu pokok ke pokok lain, sepanjang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menjelaskan aspek-aspeknya. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi pelengkap atas data yang telah dikumpulkan melalui angket dan studi dokumentasi. Subjek yang diwawancara terdiri dari atas beberapa subjek anggota sampel penelitian atau pihak lain yang dianggap dapat melengkapi keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan maka dapat disajikan kisi instrumen sebagai panduan awal untuk menyusun instrumen baik pedoman studi dokumentasi, pedoman wawancara dan butir-butir pertanyaan angket. Kisi-kisi tersebut disajikan pada tabel kisi pedoman wawancara, pada halaman berikut.

(3) Studi Literatur/Kebijakan

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penulis akan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data yang sudah terdokumentasikan. Studi ini dilakukan terhadap keputusan/peraturan/kebijakan maupun prosedur mengenai Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya maupun studi terhadap hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang terkait dengan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus maupun obyek penelitian.

3.6 Teknik Dan Analisa Data

Data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara :

1. Proses Reduksi Data, yaitu proses mengkategorikan data dan mengelompokkannya ke dalam tingkatan valuasi data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari wawancara, studi pustaka maupun dokumen akan diklasifikasikan ke dalam tingkat kepentingannya, dirangkum dan dipilah-pilah ke dalam hal yang substansial. Masing-masing data akan di *cross check* ke data yang lain sehingga akan didapat keakuratan data.
2. Penyajian Data, yaitu data yang sudah direduksi, dipilah dan dikelompokkan seperti tersebut diatas akan di sajikan dalam bentuk gambar maupun tabel sehingga mudah dipahami.
3. Kesimpulan dan verifikasi, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yang sudah diolah dan disajikan dalam tahapan sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan di mulai dari hal-hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum.

BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KELAS LAYANAN KHUSUS

4.1 Lokasi

Lokasi penelitian berada dalam wilayah Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Di Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni sumber dua pecahan Sungai Brantas. Luas wilayah Kota Surabaya 374,36 km², terbagi dalam 5 (lima) wilayah yaitu Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Timur Selatan dan Surabaya Barat Kota Surabaya berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
- Sebelah Utara dan Timur : Selat Madura

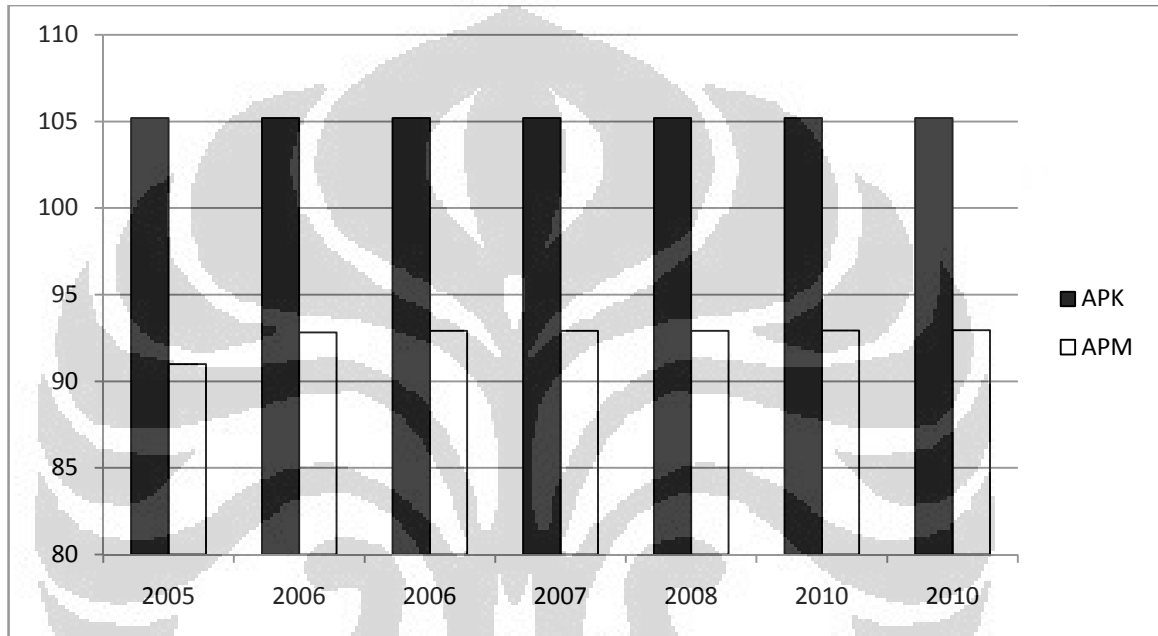
Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.765.908 jiwa. Dengan luas 374,36 km², maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.304 jiwa per km². 755.914 kepala keluarga dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.437.682 (50,23%) dan penduduk perempuan berjumlah 1.424.246 (49,77%) yang tersebar di 31 Kecamatan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang jasa, industri dan perdagangan. Berdasarkan profesi penduduk Kota Surabaya sebanyak sebagai pegawai swasta berjumlah 684.581 jiwa, ibu rumah tangga 527.343 jiwa dan pelajar berjumlah 448.551 jiwa. Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan golongan umur terdiri dari 209.506 orang (di bawah 5 -9 tahun), 195.483 orang (di atas 10 -14

tahun), 181.725 orang (usia 15 -19 tahun) . Suku Jawa adalah suku bangsa mayoritas di Surabaya. Dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebab adalah jatuhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun Jawa adalah suku mayoritas(83,68%), tetapi Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dan lainnya merupakan suku bangsa lain atau warga asing.

Generasi muda yang berkualitas handal dan berbudi adalah merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi pada tahun 2020. Pendidikan merupakan pondasi untuk mencetak generasi muda yang dihaapkan, kuncinya terletak pada pemberian layanan pendidikan terhadap anak khususnya anak-anak di sekolah dasar yang jumlahnya mencapai 25% dari jumlah penduduk. Pada kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu:

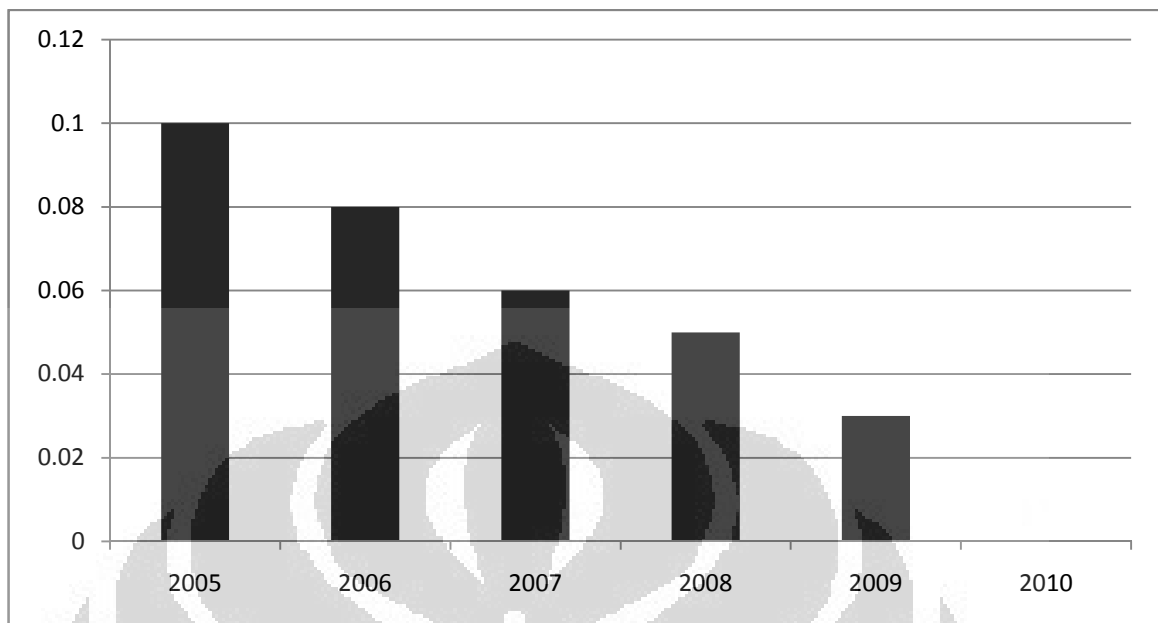
- (1) Terancamnya anak di sekolah dikarenakan kondisi keluarga yang miskin, dan kemungkinan di Kota Surabaya berjumlah 323.789 jiwa atau 90.084 keluarga miskin dan jumlah anak miskin pada di sekolah sebesar 68.834 orang (usia 7 -18 tahun) , dengan kondisi pendidikan 31.795 anak duduk di sekolah dasar, 2.082 anak tidak sekolah (usia 7 -12 tahun), 4.182 anak duduk di sekolah dasar, 11.926 anak sekolah di sekolah menengah tingkat pertama dan 26 anak tidak sekolah (usia 12 -15 tahun).
- (2) Kultimas rakyat yang masih terbentuk berpendapat bahwa menuntut ilmu agama lebih penting dari pada ilmu yang diajarkan di sekolah formal,
- (3) Terbatasnya sarana sekolah yang menyediakan kelas layanan khusus bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah dasar sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar berguna bagi lingkungan masyarakat.

Hasil capaian kinerja pembangunan pendidikan tingkat sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah Kota Surabaya terkait langsung dengan puaan akses dan pemetaan pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Muli (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.



Gambar 4.1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Muli (APM) tingkat SD/MI tahun 2005 s.d 2010

Selain itu keberhasilan dalam menekan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 4.2. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD/MI tahun 2005 s.d 2010

Berdasarkan target capaian angka partisipasi sekolah tahun 2010 sebesar 0%, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berusaha menekan angka partisipasi sekolah tersebut dengan berbagai program salah satunya melalui program Kelas Layanan Khusus (KLK). Program ini secara nasional telah dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2003. Keberhasilan program ini telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

4.2 PSM

4.2.1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banyu Urip III/364

SDN Banyu Urip III/364 merupakan sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan kelas reguler dan sekolah layanan khusus. Betokas di Jalan Banyu Urip Kidul, Gang IV No. 17, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sagatn,

Kota Surabaya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979 dan sekarang sudah mendapatkan akreditasi B. Sekolah Daarini memiliki visi misi sekolah yang mandiri, berkualitas, berwawasan nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan misi sekolah ini adalah :

- (1) mencetak siswa yang tampan, cerdas kreatif dan mandiri
- (2) mewujudkan siswa yang beriman, berakhlak dan berkehidupan mulia serta berbudaya luhur
- (3) meningkatkan kinerja guru
- (4) menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, aman, sehat dan indah
- (5) menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budaya
- (6) menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, Komite dan masyarakat

Sekolah ini juga mencantumkan tujuan pendidikan di lingkungan sekolahnya

- (1) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (2) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia
- (3) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang sehat secara fisik dan psikologis sehingga dapat berkembang dengan mudah untuk menjadi manusia kreatif
- (4) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, berani mengambil keputusan yang efektif.
- (5) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang mau belajar, bekerja, berkreasi dan selalu mengembangkan potensi diri
- (6) agar para pendidik dan siswa SDN Banyuwangi/364 menjadi manusia yang ikhlas berbagi empati dan toleransi serta mampu bekerja sama dengan orang lain,

- (7) agar para pendidik dan siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang mencintai bangsa, negara dan budayanya, dan
- (8) agar siswa SDN Banyu Urip III/364 menjadi manusia yang berkemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Ruang kelas di sekolah ini terdiri dari 5 ruang kelas dengan 10 rombongan belajar sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pagi, siang, dan sore. Fasilitas yang dimiliki sekolah ini meliputi 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang kepala dan 1 ruang laboratorium komputer.

Jumlah siswa sekarang ini ada 510 siswa dengan 12 rombongan belajar. Jumlah siswa tersebut ada di luar jumlah siswa Kelas Layanan Khusus yang berjumlah 22 siswa.

Di SDN Banyu Urip kelas layanan khusus (KLK) baru diadakan pada tahun ajaran 2009/2010. Sekolah ini menyelenggarakan program kelas layanan khusus dengan tujuan untuk

- (1) menangani anak-anak yang putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan sekolah kembali
- (2) setelah mengikuti kegiatan pendidikan kelas layanan khusus kurang lebih enam bulan siswa kelas layanan khusus dapat dipindahkan ke dalam kelas reguler
- (3) dengan mengikuti sistem belajar mengajar di sekolah dengan kelas layanan khusus diharapkan siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan untuk pengembangan karkernya.

4.2.2 Sekolah Dasar Negeri Duak I

SDN Negeri Duak I merupakan sekolah dasar negeri yang menyelenggarakan kelas reguler dan sekolah layanan khusus. Berlokasi di Jalan Alun-alun Bangunsari Baat No. 2, Kota Surabaya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1975 dan sekarang sudah mendapatkan akreditasi B. Sekolah Dasar ini memiliki visi

ditmenciptakan siswa cerdas,ampil, peduli, dan berakhlak mulia, serta beani

bersaing dalam dunia pendidikan. Sedangkan misi sekolah ini adalah :

- (1) meningkatkan mutu pendidikan,
- (2) meningkatkan kinerja sekolah beserta jajarannya,
- (3) memberi kepercayaan pada publik, dan
- (4) transparansi manajemen dan akuntabilitas

Sekolah ini juga mencanangkan tujuan pendidikan di lingkungan sekolahnya yaitu:

- (1) hasil pendidikan dapat dinikmati publik/masyarakat
- (2) mendapat dukungan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan,
- dan
- (3) mendapat kepercayaan publik.

Ruang kelas di sekolah ini terdiri dari 15 ruang kelas dengan 28 rombongan belajar sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pagi hingga siang. Ruang penunjang yang dimiliki terdiri dari: 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang kepala dan 1 ruangan laboratorium komputer, 1 ruang kepala, 2 ruang KM/WC dan 2 ruang KM/WC siswa.

Jumlah siswa sekarang ini ada 955 siswa dengan 28 rombongan belajar. Jumlah siswa tersebut di luar jumlah siswa Kelas Layanan Khusus yang berjumlah 24 siswa. Di SDN Dupak I Program Kelas Layanan Khusus (KLK) baru diadakan pada tahun ajaran 2009/2010. Sekolah ini menyelenggarakan program kelas layanan khusus dengan tujuan untuk

- (1) menangani anak-anak yang putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan sekolah kembali

- (2) setelah mengikuti kegiatan pendidikan kelas layanan khusus kurang lebih enam bulan siswa kelas layanan khusus dapat dipindahkan ke dalam kelas reguler
- (3) dengan mengikuti sistem belajar mengajar di sekolah dengan kelas layanan khusus diharapkan siswa tersebut dapat menyerap pendidikan untuk pengembangan kognitif.

4.3. Pengertian Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (SD KKL)

4.3.1. Pengertian Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus

Salah satu program besar bidang pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendukung keberhasilan Program Wajib Belajar (Wajib Pendidikan Dasar) sembilan tahun. Berbagai upaya pemerintah telah dilaksanakan, salah satunya adalah Program Kelas Layanan Khusus. Program ini merupakan program pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan belajar bagi murid sekolah. Masalah kesempatan belajar tersebut sebagai akibat dari masalah di sekolah yang dialami oleh murid akibat sekolah atau karena belum pernah mengikuti pendidikan formal. Kesempatan tersebut menjadi kemampuan secara akademis, psikologis dan sosial untuk mampu mengikuti pembelajaran bersama di kelas reguler.

Program Kelas Layanan (KLK) pada dasarnya merupakan satu program pembelajaran yang dilaksanakan di kelas khusus. Sampai saat ini pendidikan khusus yang dikembangkan adalah pendidikan bagi anak yang memiliki masalah fisik dan psikologis. Perkembangan permasalahan pendidikan yang semakin kompleks, menimbulkan berbagai perkembangan masalah anak berkelainan dalam belajar. Hal tersebut bukan saja diakibatkan keadaan fisik namun juga psikis dan sosial. Salah satu masalah yang muncul saat ini adalah anak berkelainan akibat sosial yang berkaitan dengan bidang ekonomi keluarga, yang selanjutnya disebut murid KLK. Murid KLK pada umumnya berkaitan dengan tinggalkan kelas dan sekolah karena

kemampuan ekonomi keluarga atau lingkungan. Bekerjaan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah KKK tersebut.

Program KKK ini oleh Pemerintah Pusat telah dimulai sejak tahun 2003 melalui satu program uji coba di 15 Kota, yaitu: Medan, Palembang, Semarang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Program yang telah diujicobakan tersebut dinilai efektif dan akan dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang belum bersekolah atau bersekolah untuk dapat bersekolah sampai tamat Sekolah Dasar.

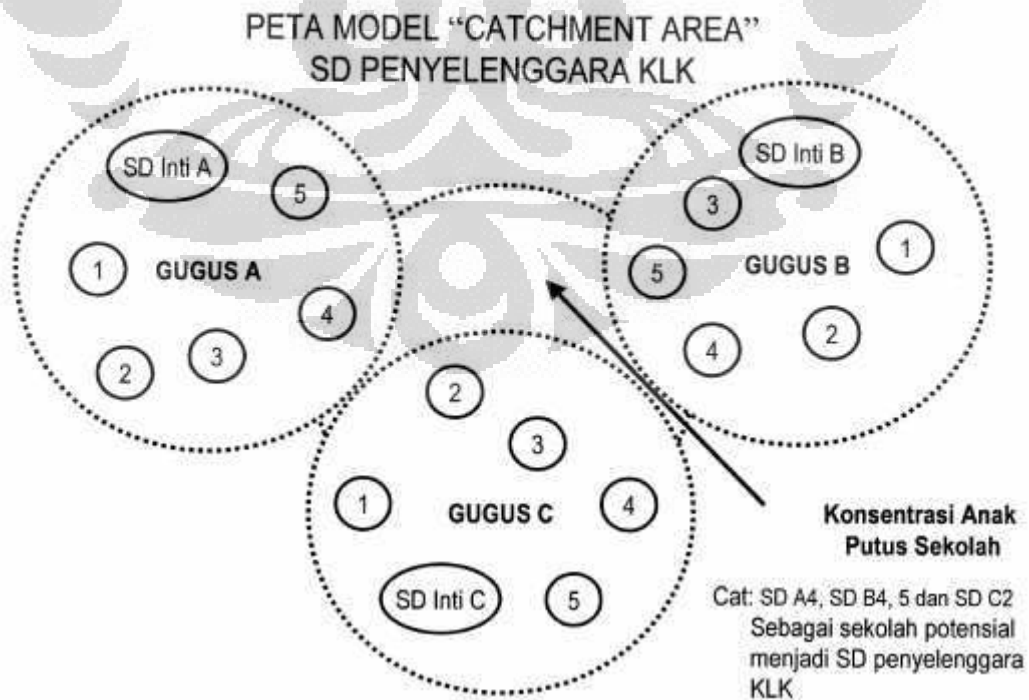
4.3.2. Tujuan dan Sasaran Program Kelas Layanan Khusus

Tujuan umum program kelas layanan khusus (KKK) di Sekolah Dasar adalah agar anak-anak di Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau bersekolah memperoleh pendidikan di Sekolah Dasar sampai tamat. Sedangkan tujuan khusus penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KKK) di Sekolah Dasar adalah membantu peserta didik menyiapkan diri secara psikologis, sosiologis dan akademis untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler.

Pengembangan permasalahan pendidikan yang semakin kompleks, menimbulkan berbagai perkembangan masalah anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Hal tersebut bukan saja diakibatkan keadaan fisik namun juga psikis dan sosial. Salah satu masalah yang muncul adalah anak berkebutuhan khusus sebagai akibat dari berkaitan dengan bidang ekonomis. Anak berkebutuhan khusus terutama umumnya berkaitan dengan tinggal kelas dan bersekolah karena ketidadaan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Bekerjaan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang telah bersekolah di sekolah umum tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan

dan kebutuhannya, maupun terhadap anak-anak berkelainan yang belum sampai mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di sekolah umum.

Model pendidikan anak berkelainan tua adalah model segregatif yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan lain-lain. Dari segi pengelolaan, model segregatif memang menguntungkan, karena mudah bagi urusan administrasi. Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregatif merugikan. Hal ini dinyatakan oleh Reynolds dan Bich dalam Sunadi, bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu secara filosofis model segregatif tidak logis karena menyangkan peserta didik agar kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. (Sunadi, Menuju Pendidikan Inklusif, Bandung, hal. 3). Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.



Gambar 4.3. Peta Model Cathment Area

4. G

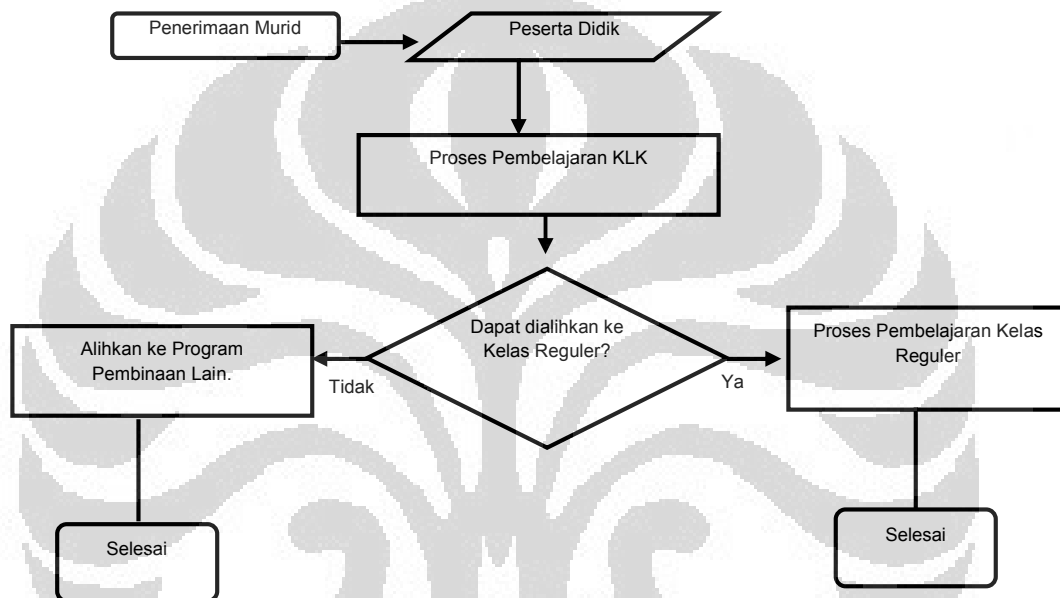
Kriteria g adalah:

- Berasal dari SD penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus
- Didatangkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Berpengalaman mengajardi Sekolah Dasar minimal 5 (lima) tahun
- Lulusan seleksi

5. Daerah

- Diselenggarakan dengan membuka kelas khusus pada Sekolah Dasar Negeri yang berada di suatu lokasi yang banyak terdapat anak-anak belum bersekolah atau kurang berprestasi.
- Merupakan kelas sementara bukan kelas pamanen dan pembelajarannya dilaksanakan di luar jadwal kelas reguler
- Setiap Sekolah Penyelenggaraan KKK dikelola oleh seorang kepala sekolah dan 3 (tiga) orang guru yang berasal dari sekolah tersebut.
- Setiap peserta didik diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun duduk di KKK sampai ia memiliki kemampuan akademik, psikologis, dan sosial yang memadai untuk dialihkan ke kelas reguler
- Peserta didik yang telah memiliki kemampuan akademik, psikologis, dan sosial yang memadai sehingga dinilai telah mampu beradaptasi dengan siswa reguler akan dialihkan ke kelas reguler sesuai dengan tingkat kematangan kejadiannya masing-masing, atau berdasarkan hasil tes penempatan (*placement test*.)
- Jika dalam waktu 1 (satu) tahun ajaran peserta didik tidak bisa pindah ke kelas reguler (mengalami kesulitan) maka akan dikeluarkan dari KKK dan akan dipindahkan ke program lain.

- Mendapat bantuan dana penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus dalam bentuk *Block Grant* ke sekolah penyelenggara KKL mencakup: (1) Biaya Operasional; (2) Honor Pengelola; (3) Beasiswa; dan (4) Buku Pembelajaran.
- Peserta didik yang telah dialihkan ke kelas reguler dibiayai melalui beasiswa atau biaya lain dari daerah sampai ke tingkat Sekolah Dasar



Gambar 4.4. Diagram Skema KKL

6. Desain Pembelajaran

- Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah Pembelajaran Terpadu dan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) atau *Multigrade Teaching*.
- Peserta didik dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kelas rangkap A (KRA) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 1 dan 2, kelas rangkap B (KRB) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 3 dan 4, dan kelas rangkap C (KRC) terdiri dari peserta didik dengan tingkat kelas 5 dan 6.
- Kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum yang berlaku di kelas reguler

- Intervensi psikologis dan biologis yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran sangat ditekankan dalam pembelajaran di Kelas Layanan Khusus (KLK) guna mempersiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran di kelas reguler

7. Mekanisme

- Dinas Pendidikan menentukan Sekolah Dasar penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK) dan mensinkronkan program kepada Kepala Sekolah, Guru, dan masyarakat
- Dinas Pendidikan menetapkan sekolah dan pengelola yang menyelenggarakan diklat bagi kepala sekolah dan guru penyelenggara Kelas Layanan Khusus
- Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah dalam keangka pembinaan kepada sekolah-sekolah penyelenggara Kelas Layanan Khusus (KLK).

4.3.3 Pohon Pembelajaran

Menurut Gagne, Bing, dan Wagner (*Principles of Instructional Design*, 1988, p. 114) pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang agar terjadi pembelajaran diri siswa. Dari pengertian tersebut, rangkaian kegiatan yang diharapkan tidak selalu dilaksanakan di dalam kelas tetapi seluruh kegiatan baik di dalam dan di luar kelas seperti pertemuan, diskusi, dan bahkan di rumah yang kesemuanya memang didesain untuk siswa agar melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, yang menjadi ciri utama dari pembelajaran adalah unsur kesengajaan dari pihak di luar siswa yang mempersiapkan situasi dan sarana sedemikian rupa agar tercapai kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah ketercapaian dari kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah melewati proses belajar.

Pendekatan pembelajaran kelas yang harus diperhatikan pada dasarnya guru memperhatikan prinsip-prinsip belajar seperti berikut: (Udin, S. Winatap, dan Sit Juleeha: 2003: p. 18).

- a. **Kepribadian**. Yang dimaksud kepribadian adalah mencakup kepribadian fisik, intelegensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang lalu dan faktor-faktor lain yang memungkinkan siswa dapat belajar. Apabila siswa belum siap untuk melaksanakan tugas belajar maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan untuk menguasai kemampuan yang dihaapkan. Beberapa hal yang berkaitan dengan kepribadian siswa dalam belajar yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran:
 - 1) siswa dapat belajar dengan baik apabila guru memberikan hubungan dengan kemampuan, minat dan latar belakang mereka,
 - 2) guru yang baik harus mengkaji dahulu dengan melakukan pengamatan kepribadian untuk mendapatkan gambaran tentang kepribadian siswa,
 - 3) guru harus menjabarkan tugas yang sesuai dengan kepribadian siswa,
 - 4) guru harus menyadari bahwa siswa-siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang sama dapat saja memiliki pola kemampuan mental yang berbeda, sehingga guru dapat menancang kegiatan yang sesuai,
 - 5) bahan-bahan dan kegiatan harus diancang secara bervariasi sesuai dengan faktor kepribadian siswa.
- b. **Matematika**. Secara alami, anak-anak selalu memiliki rasa ingin tahu dengan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya dan mencoba-coba hal-hal yang baru atau unik, sehingga guru harus mendorong atau memotivasi siswa dan bukan menghambat. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan proses pembelajaran yaitu
 - 1) hendaknya siswa didorong untuk mendapatkan atau mencapai suatu yang lebih dari yang didapatkannya di rumah atau di sekolah,

- 2) siswa harus diingatkan bahwa pengalaman tentang kegagalan yang tidak menakutkan diri siswa dapat menjadi motivasi agar siswa memelihara keteguhan dalam belajar
- 3) rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan akan cenderung meningkatkan motivasi belajar
- 4) proses belajar yang dikaitkan dengan minat siswa akan dapat mempertinggi motivasi
- 5) komentar dan penguatan yang diberikan guru atau teman sebaya akan berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku,
- 6) penghargaan berupa gunaan insentif atau hadiah yang diberikan memang terbukti memotivasi siswa agar lebih giat belajar
- 7) kompetisi yang tidak ketat dengan kriteria yang tidak tinggi yang akan membuat kesempatan menang relatif kecil, dapat mengurangi motivasi pada siswa.

c. **Persepsi**. Seorang guru dapat memahami siswa yang lebih baik, bila ia dapat melihat bagaimana cara seorang melihat atau menilai sesuatu. Siswa yang memiliki persepsi terhadap kegiatan belajarnya diing, akan membuat siswa senang dan bertanggung jawab dalam belajar

Hal-hal yang harus diperhatikan guru berkenaan dengan menumbuhkan persepsi pada siswa adalah:

- 1) guru hendaknya memberikan tugas yang memang dapat diselesaikan pada siswa sesuai dengan kecepatan masing-masing,
- 2) guru dapat mempersiapkan kegiatan kelompok yang diadakan atas pengelompokan siswa berdasarkan keanggotaan siswa yang sama.

- 3) menggunakan gas tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran dan memberikan pengayaan bagi siswa yang pandai,
- 4) melaksanakan pembelajaran per satuan yang mengajarkan siswa agar dapat memecahkan permasalahan yang ditinjau dari berbagai bidang pengetahuan,

d. **Transfer** . Belajar dapat dikatakan bermakna apabila siswa dapat menyimpan dan menyimpan (retensi) dan menggunakan (transfer) ilmu yang dipelajarnya dalam situasi yang lain.

Beberapa hal berikut ini harus diperhatikan guna agar transfer dan retensi berhasil:

- 1) bahan yang bermakna yang disajikan gunakan lebih mudah diingat dan disimpan dalam benak siswa,
- 2) kegiatan latihan yang terbagi -bagi memungkinkan terjadi retensi yang baik,
- 3) mengakhiri pembelajaran dengan melakukan peninjauan atau rangkuman dari materi yang diajarkan, dapat memperkuat retensi dan transfer

e. **Behavioristik** Belajar kognitif mencakup aspek-aspek antara lain pembentukan konsep penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku. Pembelajaran kognitif dapat terjadi pada berbagai tingkat keakraban dan menyangkut berbagai aktivitas mental. Beberapa hal yang harus diperhatikan guna agar lain sebagai berikut

- 1) pengalaman belajar harus digeneralisasikan ke dalam situasi-situasi pembelajaran yang sesuai,

- 2) dalam memecahkan masalah, pada saat harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah sehingga memungkinkan siswa berfikir lebih lanjut

f. **Bahasa Afektif** Cakupan belajar afektif adalah nilai, emosi, dorongan, minat dan sikap. Dalam beberapa situasi pembelajaran, kadang-kadang siswa tidak menyadari belajar afektif. Hal-hal yang diperhatikan guru

- 1) sikap dan nilai yang terbentuk melalui identifikasi dari orang lain dan bukan sebagai hasil belajar langsung.
- 2) sikap lebih mudah dibentuk melalui pengalaman yang menyenangkan,
- 3) nilai-nilai yang ada pada diri siswa juga dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok,
- 4) belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi dengan guru dalam kelas
- 5) siswa dapat dibantu mengenal dan memahami sikap pribadi, dan emosi. Penghargaan terhadap sikap pribadi, dan perasaan yang positif untuk membantu memperluas pengetahuan diri dan kematangannya.

g. **Bahasa Psikomotorik** Proses belajar psikomotorik menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan aktivitas fisiknya. Belajar jenis ini menuntut keaktifan aspek mental dan fisik. Beberapa hal yang diperhatikan dalam belajar psikomotorik adalah:

- 1) guru dapat menciptakan kondisi bermain dan aktivitas informal, agar siswa dapat memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya dengan lebih baik,

- 2) faktor lingkungan dapat memberi pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan kelompok.
- 3) tugas yang terlalu banyak dan berat bagi siswa dapat menimbulkan rasa (kelelahan) dan kelelahan yang lebih cepat.

Dalam kaitannya dengan tugas yang mengelola kelas, di mana para siswa yang ada di dalamnya memiliki kekhasan sendiri, maka guru menggunakan prinsip belajar di atas agar pembelajaran dapat bermanfaat.

4.3.4. Belajar Pribadi dalam Pembelajaran.

Dengan memperhatikan karakteristik yang khas dari para siswa di kelas, guru juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar yang ada, maka ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang dapat diaplikasikan untuk kelas, khususnya pada pembelajaran individu, kelas anggotanya dan kooperatif yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Pembelajaran Individual

Pembelajaran individual merupakan bentuk pembelajaran individu model terpadu. Dalam pembelajaran individu model terpadu, pembelajaran dimulai dari satu tema. Oleh karena itu model pembelajaran ini dikenal juga dengan sebutan Pembelajaran Tematik.

Dengan menerapkan model pembelajaran individual, baik guru maupun siswa akan memperoleh banyak manfaat. Adapun manfaat pelaksanaan pembelajaran individual, yaitu:

- 1) pembelajaran individual memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkegiatan dalam belajar. Pengintegrasian materi dalam sebuah tema

akan memdahkan gundalam membahas mat i r pada kelas dengan tingkat kemampuan yng berbeda.

- 2) siswa memiliki kesempatan nk belajardan menggunakan ketampilan ke dalam sis yng nyata.
- 3) siswa mempunyai motivasi belajar yng tinggi, tema apabila tema yng dibahas ditekankan scan beama -ama dengan siswa.
- 4) dengan menerapkan pembelajaran tematik, siswa tidak hanya memperoleh dampak pembelajaran (intional effect) tap jga dampak pngiing (nanteffect) dari pembelajaran yng betangsung sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa.

b. Pembelajaran Khs Rangkap

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Multigade Teaching (MGT). MGT mengandung dua pengertian yaitu Multiclas Teaching dan Multilevel Teaching. Multiclas Teaching yakni pembelajaran yng dilakukan oleh seorang gundalam aktubeamaan dengan menggunakan penangkapan kelas (dua kelas atau lebih). Sedangkan Multilevel Teaching adalah pembelajaran terhadap beberapa kelompok pesa didik yng berbeda tingkat at kemampnny dan dilakukan oleh seorang gundalam aktuyng beamaan. Multiclas Teaching menekankan pada perbedaan tingkat kelas sedangkan Multilevel Teaching menekankan pada perbedaan tingkat kemampuan pesa didik. Berikut ini diberikan beberapa alasan penerapan PKR dalam kelas yaitu (A. Djalil ; 2003 ; 45)

- Kuantitas dan ekuitas. PKR dapat membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran untuk jumlah pesa didik yng lebih besar (kuantitas), merata, dan adil (ekuitas) dengan memanfaatkan gedung yang kelas yng terbatas

- Ekonomis PKR memungkinkan ~~atau~~ biaya pendidikan jauh lebih kecil. Dengan jumlah dana pendidikan ~~yang sama~~, ~~petuaan~~ pelayanan pendidikan dapat diberikan sampai ke daerah ~~yang~~ ~~slit~~ kecil, dan ~~tepencil~~.
- Pedagogis PKR ~~mamp~~ meningkatkan kemandirian dan keaktifan ~~pesa~~ didik dalam belajar. ~~Pesa~~ didik ~~yang~~ dianggap lebih pintar dapat membantu ~~pesa~~ didik lainnya (sebagai ~~tsbay~~). Dalam PKR, ~~pesa~~ didik ~~ekondis~~ bekerja ~~scan~~ individual, ~~bepaangan~~, atau bekerja dalam kelompok.
- Keamanan. Dengan ~~pendekaan~~ PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi ~~yang~~ mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, ~~kekawat~~an ~~ong~~ tua ~~theadap~~ kemungkinan ~~ejadiny~~ kecelakaan pada anak ~~-anak~~ mereka menjadi berkurang.
- Suatu pembelajaran dianggap menerapkan pendekatan PKR apabila pembelajaran ~~tsbut~~ menunjukkan penerapan prinsip ~~-insip~~ sebagai berikut.
- Kesempakan. Pembelajaran dilakukan ~~scan~~ ~~sempak~~ dan dalam kurun waktu ~~yang~~ bersamaan pada dua kelas atau lebih (multiclassteaching) dan ~~atupada~~ beberapa kelompok siswa ~~yang~~ memiliki tingkat kemampuan ~~yang~~ berbeda (multilevel teaching). Kesempakan ini bermaksud bermakna, ~~atny~~ kegiatan ~~tsbut~~ mempunyai tujuan ~~yang~~ ~~ssai~~ dengan tuntutan kurikulum.
- Waktu Aktivitas Akademik Tinggi. Dalam PKR, ~~pesa~~ didik ~~thibat~~ aktif dalam pembelajaran. Gurudak meninggalkan ~~psa~~ didik atau kelompok belajar dalam keadaan mengangguk atau tidak ada kegiatan.
- Kontak Psikologis ~~yang~~ Berkelanjutan. Kontak dengan ~~pesa~~ ~~a~~ didik dilakukan ~~scan~~ ~~tsmenes~~ ~~Gurus~~ ~~lalum~~ melakukan ~~pngaān~~ dan memberikan balikan serta dorongan kepada ~~psa~~ didik selama pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan berbagai teknik, guru memberikan perhatian kepada ~~stap~~ ~~psa~~ didik.

- Pemanfaatan Sumber Belajar secara Efisien. Tingkat penggunaan sebagai sumber belajar baik buku maupun sumber belajar lainnya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena tidak selamanya dapat berhubungan secara tatap muka dengan peserta didik secara langsung.
- Belajar Mandiri. Prinsip ini merupakan akibat langsung dari penerapan prinsip-prinsip sebelumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut peserta didik akan memiliki kebiasaan untuk belajar secara mandiri. Dalam belajar peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru juga dengan kelompok belajar dan sumber belajar lainnya.

Banyak variasi model PKR yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan PKR. Dalam KKK ini, model yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran adalah model PKR 211 (dua kelas satu mata pelajaran, dalam satu ruang) atau PKR 221 (dua kelas dua mata pelajaran, dalam satu ruang). Pemilihan model tergantung pada kondisi setempat (Udin S Winataputra & Siti Julia; 66)

c. Pembelajaran Kooperatif

Pendekatan dalam pembelajaran ini memandang belajar sebagai suatu cara untuk mencapai kerja sama antar-individu atau antar-kelompok. Dalam kaitannya dengan tujuan utama yang diancang dalam kelas yakni khusus pembelajaran kooperatif ini sangat sesuai untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi para siswa yang tidak mendapatkan suasana bermain dan belajar yang menyenangkan karena lebih banyak di jalankan dan bekerja. Penggunaan pembelajaran kooperatif secara benar dapat (1) mengaktifkan siswa dalam pembelajaran; (2) tumbuhnya sikap saling menghormati antar anggota kelompok dan prestasi antar para siswa; (3) sifat menghargai perbedaan dan kemandirian pendapat dapat dibangun; (4) diantara para siswa yang menjadi anggota kelompok dapat saling

memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki; dan (5) membentuk kebiasaan bekerjasama dan saling membantu. Karakteristik yang menonjol dari pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berlangsung dalam berbagai jenis kelompok siswa untuk mengeksplorasi berbagai pengetahuan yang dimiliki para siswa dalam mengerjakan suatu tugas. Kelompok-kelompok yang dibentuk dapat berasal dari berbagai jenis kelompok siswa, seperti kelompok siswa yang homogen baik dari segi kemampuan maupun kemampuan, kelompok siswa heterogen dari segi kemampuan dan kemampuan, kelompok siswa acak, dan kelompok siswa berdasarkan jenis kelamin. Walaupun pembelajaran kooperatif diterapkan pada setiap kelompok, tetapi tidak semua kelompok dapat dikatakan sebagai pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari pembelajaran ini, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola pembelajaran yang sering disebut pembelajaran kelompok yang ini.

- 1) Saling ketergantungan sesama diri. Artinya salah satu anggota mempunyai peranan dan kontribusi dalam menentukan keberhasilan kelompoknya. Dengan demikian, guru harus dapat mengorganisir tugas sedemikian rupa dalam kelompok kerja sehingga memungkinkan setiap anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas sendiri agar yang lain juga dapat mencapai tujuan mereka. Dalam hal penilaian yang ditetapkan guru ada nilai yang diperoleh untuk masing-masing individu dan ada pula nilai kelompok yang ditentukan dari nilai masing-masing anggota kelompok.
- 2) Tanggungjawab bersama. Hal ini merupakan akibat langsung dari aturan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai kontribusi dalam nilai kelompok yang diperoleh. Dalam pembelajaran ini, guru harus merancang tugas yang mengharuskan masing-masing anggota

kelompok melakukan tanggung jawabnya sendiri agar tugas berjalan dalam kelompok dapat dikejakan.

- 3) **Tatap muka.** Setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berdiskusi.
- 4) **Komunikasi antar anggota.** Sebelum guru memberikan tugas kepada kelompok, para siswa harus sudah dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Petunjuk yang tidak semua para siswa mempunyai kemampuan saling mendengarkan dan mengutarakan buah pikiran mereka dengan jelas dan dimengerti.
- 5) **Evaluasi kelompok.** Guru hendaknya menantang kelompok agar kelompok dapat mengevaluasi proses kerja kelompok yang telah dilaluinya sehingga kelompok selanjutnya dapat berfungsi dengan efektif.

Sedangkan menurut National Board for Professional Teaching Skill yang ada di Amerika Serikat standar kompetensi bagi guru yang menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru dengan menggunakan instrumen *What Teachers Should Know and Be Able to Do*, didalamnya ada 5 (lima) pokok utama yang dievaluasi dipunyai oleh masing-masing guru, yaitu:

1. **Teachers are Committed to Students and Their Learning** yang mencakup : (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, (c) pelaksanaan guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan (d) misi guru dalam mempersiapkan akrawala berfikir siswa.
2. **Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects to Students** mencakup : (a) apresiasi guru tentang pemahaman materi mata pelajaran untuk dikreasi, disusun dan dihubungkan dengan materi pelajaran lain, (b) kemampuan guru untuk menyampaikan materi pelajaran (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (multiple path).

3. Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student Learning mencakup: (a) penguasaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran, (b) monitoring pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (grouping), kemampuan untuk memberikan ganjaran (reward) atas keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa secara teratur dan (d) keadaan akan tujuan utama pembelajaran.
4. Teachers Think Systematically About Their Practice and Learn from Experience mencakup: (a) Guru secara sistematis menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai penelitian tentang pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran.
5. Teachers are Members of Learning Communities mencakup : (a) guru memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya, (b) guru bekerja sama dengan tua orang siswa, (c) guru dapat menaikkan keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat

4.3.5 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Layanan Khusus

Dalam pelaksanaan pembelajaran Kelas Layanan Khusus perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Plan Kelas

Pengelolaan kelas adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif. Iklim pembelajaran yang kondusif akan mendorong munculnya tingkah laku siswa positif yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial yang baik, serta menciptakan dan memelihara suasana kelas yang produktif dan efektif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat bagi terciptanya pembelajaran yang efektif.

Pengelolaan kelas ini mencakup penataan lingkungan fisik, penataan tempat duduk, penataan pajangan dan penataan lingkungan psikosial kelas.

1) Penataan lingkungan fisik

Pengelolaan kelas yang efektif bermula dari penataan ruangan kelas dan isinya. Guru hendaknya menata ruangan kelas dan isinya sehingga kelas menjadi lingkungan yang menarik dan efektif untuk belajar. Lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, guru menata tempat duduk dan barang-barang yang ada di ruangan kelas sehingga dapat mendukung dan memperlancar pembelajaran. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan fisik kelas adalah sebagai berikut:

- a) Keleluasaan pandangan (visibility). Hal pertama yang harus diperhatikan guru dalam menata ruangan kelas adalah keleluasaan pandangan (visibility). Artinya, penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang materi/benda-benda yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa harus dapat melihat kegiatan pembelajaran dari tempat duduk mereka dengan nyaman.
- b) Mudah dicapai (accessibility). Barang-barang yang sering digunakan siswa dalam pembelajaran hendaknya diletakkan pada tempat yang dapat

dengan mudah dijangkau oleh siswa yang bersangkutan. Apabila mereka membutuhkannya, mereka tidak perlu meminta bantuan guru untuk mengambilnya. Rancangan hendaknya dibuat dengan baik sehingga lalu lintas kegiatan belajar di kelas tidak terganggu. Jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat dengan mudah bergerak dan tidak mengganggu siswa lainnya yang sedang mengikuti proses pembelajaran dimaksud.

- c) Keluwesan (fleksibilitas). Barang-barang yang ada di dalam kelas hendaknya mudah untuk dipindah-pindahkan sesuai dengan tuntutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa dan guru. Penataan ruangan kelas hendaknya sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa.
- d) Kenyamanan. Di samping guru menata ruangan kelas sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, guru dituntut untuk menata lingkungan kelas yang dapat memberikan kenyamanan baik bagi siswa maupun bagi guru sendiri. Prinsip kenyamanan ini berkaitan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Kenyamanan ruangan kelas akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran.
- e) Keindahan. Dalam menata ruangan kelas prinsip keindahan ini perlu diperhatikan. Prinsip ini berkaitan dengan usaha guru menata ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan berpengaruh positif terhadap sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

2) **Prinsip Penataan Ruang Kelas**

Dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, guru menerapkan berbagai materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran

yang ditetapkan guru untuk susunan tempat duduk yang berbeda-beda. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran secara klasikal akan berbeda dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan secara kelompok. Dengan kata lain, guru harus menata tempat duduk siswa sesuai dengan kebutuhan dan untuk memperlancar proses pembelajaran.

3) Penataan Papan

Pajangan mempunyai peranan yang penting untuk menjadikan ruang kelas menarik dan membuat peserta didik betah di kelas. Pajangan tersebut dapat berbentuk grafik, gambar dan hasil karya peserta didik, misalnya: lukisan, kerajinan tangan, dan kaangan yang mengandung pesan kependidikan. Pajangan, baik yang dibuat oleh peserta didik atau oleh guru dapat diempelkan pada sebuah papan. Pajangan berfungsi sebagai alat pengajaran, antara lain untuk memberikan informasi, memamerkan karya peserta didik, menampilkan soal atau teka-teki, dan mendorong peserta didik bekerja sama. Namun demikian perlu dicatat, bahwa pajangan-pajangan dimaksud sebaiknya harus relevan dengan materi pelajaran pada kelas atau materi yang bersangkutan.

4) Penataan Lingkungan Fisik dan Psikologis.

Mekipun penataan lingkungan fisik kelas merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan kelas, keadaan lingkungan psikologis kelas juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kelas yang kondusif bagi pembelajaran. Iklim psikologis kelas dimaksudkan berkaitan erat dengan hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa akan dapat menciptakan iklim psikologis kelas yang sehat yang efektif bagi berlangsungnya pembelajaran.

Bekenaan dengan pengelolaan iklim mikro sosial kelas Bandura menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengelola iklim sosial kelas dipengaruhi oleh karakteristik guru sendiri. Karakteristik yang harus dimiliki guru untuk iklim sosial kelas yang efektif bagi kelangsungan pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Diskusi oleh siswa. Apabila siswa telah menanggapi guru, maka siswa akan selalu berusaha untuk mengikuti apa yang diucapkan guru. Oleh karena itu salah satu karakteristik yang harus dimiliki guru adalah disiplin oleh siswa. Beberapa sifat guru yang memungkinkan untuk disiplin ialah perang, amah, tegas, dan mendengarkan keluhan siswa, dan percaya diri.
- b) Memiliki perspektif yang realistis tentang dirinya dan siswa. Guru yang memiliki pandangan yang tidak realistis terhadap kemampuan siswa dan dirinya dapat menghambat efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memiliki pandangan yang realistis terhadap kemampuan siswa, dengan demikian dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menantang dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang memandang kemampuan dirinya telah memiliki kecenderungan kurang percaya diri. Padahal jika percaya diri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki guru dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Sementara itu guru yang memandang kemampuan dirinya telah tinggi akan dapat mengganggu hubungannya dengan siswa. Selain itu guru harus menerima apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki siswa.
- c) Akrab dengan siswa dalam batas hubungan guru-siswa. Untuk mengembangkan hubungan yang baik antara guru-siswa, guru perlu

mengediakan waktu untuk mengenal siswa lebih banyak. Namun perlu diingat bahwa, hubungan yang terlalu dekat antara guru dan siswa perlu dihindari agar siswa tetap menghormati dan menghargai guru sebagai orang tua.

- 1) Berkecenderungan terhadap pertanyaan/tespon siswa. Bagi beberapa guru pertanyaan yang diajukan oleh siswa seringkali dianggap sebagai ujian. Seolah-olah siswa ingin menguji tingkat penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan. Situasi semacam ini menimbulkan rasa tidak aman pada guru. Sikap kekhawatiran terhadap pertanyaan siswa akan muncul apabila guru memang menguasai materi yang sedang dibahas. Oleh karena itu, guru mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 2) Sabar, teguh, dan tegas. Sebagai guru kita dituntut untuk sabar. Kadang-kadang siswa selalu ingin menguji kesabaran kita. Apabila kita tidak sabar, siswa akan merasa ketakutan untuk mengajukan masalah yang dihadapi. Selain itu, juga harus teguh dan tegas dalam memegang aturan.

Selain dari pribadi guru sendiri, iklim psikologis kelas juga dipengaruhi oleh hubungan sosial antar siswa. Hubungan sosial yang kurang baik antar siswa dapat mengganggu lancarnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal teman-temannya sehingga mereka akan merasa sebagai satu kesatuan. Perasaan semacam itu akan tumbuh pada diri siswa apabila guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk berajard dan keaja dalam kelompok.

Berkaitan dengan keterampilan mengelola, terdapat dua komponen keterampilan mengelola kelas yang dikuasai oleh guru. (Wadhvani dan Juliaha, 2002, p. 32) Kedua komponen keterampilan mengelola kelas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara: memandang secara seksama, mendekat, memberikan perhatian, atau memberikan reaksi apabila ada gangguan dalam kelas
- 2) Membagi perhatian secara verbal dan nonverbal.
- 3) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menunjuk pada didik dan menuntut tanggung jawab pada didik.
- 4) Memberi petunjuk - petunjuk yang jelas
- 5) Menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas buta dapat memberikan perhatian atau perhatian, serta membatasi.
- 6) Memberikan penguatan bila perlu

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan sikap guru terhadap sikap negatif pada didik yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini guru dapat menggunakan dua jenis strategi yaitu modifikasi tingkah laku dan pengendalian (psikologi) kelompok.

- 1) Modifikasi Tingkah Laku. Dalam strategi ini terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus dikuasai guru yaitu
 - mengajarkan tingkah laku yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan,
 - meningkatkan munculnya tingkah laku yang baik dengan memberikan penguatan, dan
 - mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman.

Keiga hal ini has dilakukan gu dengan catan bahwa pelaksanaan dilakukan sgen setelah perilaku terjadi. Demikian pula hukuman, has diberikan scan ibadi dan tsendir. Hukuman itu sendir hany dilaksanakan gubila memang diptukan.

2) Pengelolaan Kelompok. Dalam begi ini, kelompok dim anfaakan dalam memecah-kan maalah -maalah pengelolaan kelas yng muncul, tema melalui dikusi. Dua hal yng phulakukan gmadalah:

- mempetancargas -gudengan caa mengahakan tejadiny keja am a dan meneapkan sandarsa pdurkeja,
- memelihaa kegiatan kelompok, dengan caa memelihaa dan memulihkan smangat menangani konflik yng imbul, sa mempekecil maalah yng imbul.

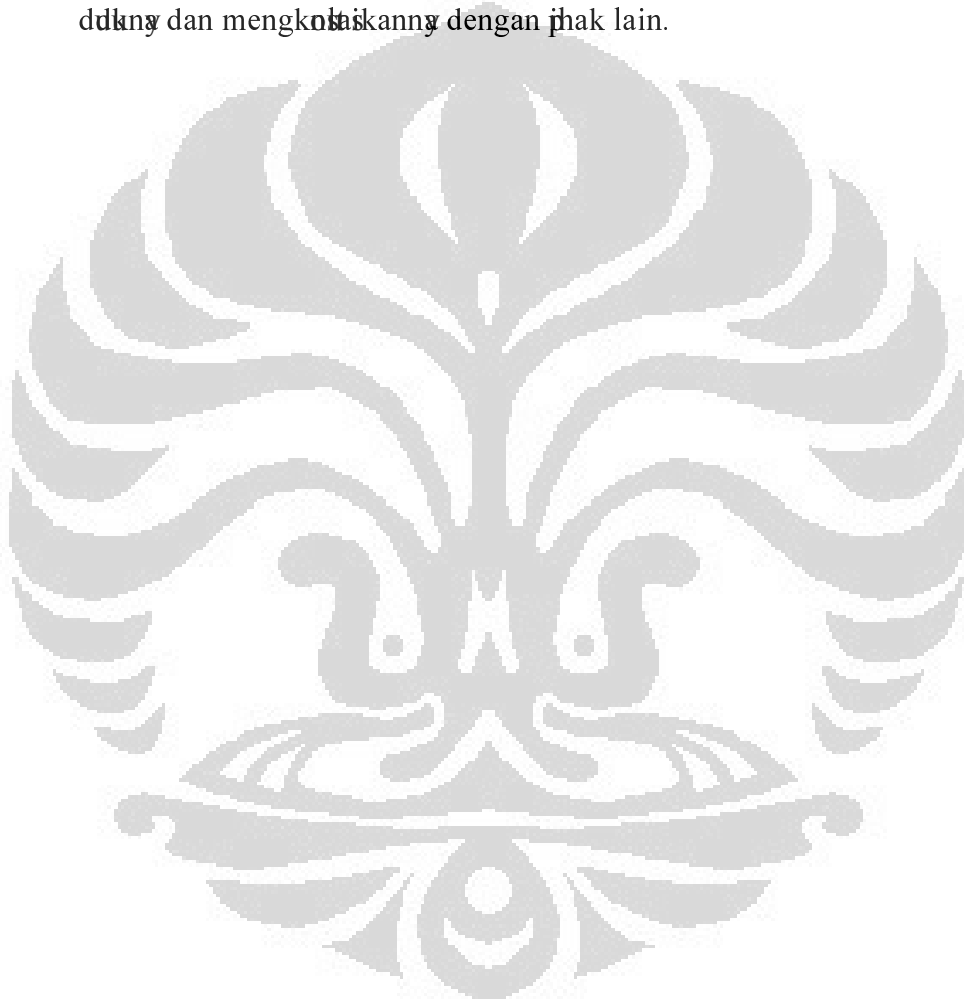
Dalam meneapkan ketampilan mengelola kelas petudiingat enam insip beikut:

- Kehangatan dan keantian dalam mengajardapatmencipkan iklim kelas yng menyngkan.
- Gurudapat menggunakan kaa -kaa ahuindakan yng dapt menantang pesa didik untuk bepikir
- Guru dapat menggunakan berbagai varais y ang dapat menghilangkan kebosanan.
- Keluwean gulalam plaksanaan tugaspehulitngkakan.
- Penekanan pada hal-hal yng beifatif pehulipehatikan.
- Penanaman disiplin diri sendir menpakan modal daarbagi gu.

Selanjty, dalam mengelola kelas guhendakny menghindar hal -hal sbagai beikut:

- Campangan yng betebihan.

- 1) Menangani gangguan ingan, dengan cara mengabaikan, menatapagak lama, menggunakan tanda verbal, mendekat, memanggil nama, dan mengabaikan secara sengaja.
- 2) Menangani gangguan bentuk, dengan cara memberi hukuman dan melibakan orang tua.
- 3) Menangani perilaku agresif, dengan cara mengubah/ menarik teman di dekatnya dan mengkonfrontasinya dengan pihak lain.



BAB 5

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan mencoba menguraikan hasil evaluasi program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (SD KKL) di Kota Surabaya. Dalam bab ini juga berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan program Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar pelaksana program tersebut yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan informan-informan terpilih kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam mengevaluasi program Kelas Layanan Khusus melalui dana APBD Kota Surabaya.

Penilaian terhadap bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD menggunakan indikator (1) output yaitu program, tujuan, dan landasan hukum terkait dengan pelaksanaan program SD KKL, (2) input yaitu karakteristik sekolah, karakteristik guru, karakteristik siswa, kurikulum, sumber dana dan dukungan pemerintah daerah, (3) proses yaitu lokasi alias program, penentuan sekolah pelaksana KKL, rekrutmen siswa, dan pengelolaan program KKL, dan (4) produk yaitu jumlah siswa di kelas reguler, tingkat adaptasi siswa di kelas reguler, dan prestasi siswa di kelas reguler.

5.1. Hasil Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan terkait seperti Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah SDN Dupak I, dan Kepala Sekolah SDN Banyuurip III/364. Dalam pelaksanaan wawancara para informan juga didampingi oleh staf Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan guru-guru program KKL dari masing-masing sekolah sebagai informan pelengkap dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang

dihadapi terkait dengan pelaksanaan program KLK. Dalam upaya mendapatkan informasi yang lengkap peneliti memberikan instrumen sebagai pelengkap untuk mengungkap secara faktual dari responden penelitian.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan KLK Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menekan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan program KLK Sekolah dasar terlaksana cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana efektivitas pemanfaatan kebijakan pendidikan KLK sekolah Dasar dalam upaya menekan angka drop out jenjang sekolah dasar dan mensukseskan program Wajib belajar 9 sembilan tahun khusus di Kota Surabaya. Sesuai operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan wawancara peneliti berpijak pada evaluasi program model CIPP yaitu *Context Input Process*, dan *Product*.

Petani, aspek dalam pelaksanaan program SD KLK, walaupun tidak ada pernyataan khusus terkait dengan sukses program SD KLK diketahui bahwa baik Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maupun Kepala Sekolah dan guru-guru menyadari betul tentang tujuan, dasar pelaksanaan dan manfaat program SD KLK sebagai salah satu untuk menekan angka putus sekolah anak-anak di sekolah dasar kembali ke sekolah hingga dapat menyelesaikan sekolah dasar. Petikan wawancara dengan Eko Pratomo sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Hari Prasty Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, dan Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyurip III/364.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Pratomo sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“masyarakat sudah mengetahui program ini sehingga banyak pihak yang mendukung”

“sebelum membahas anggaran program dengan DPRD biasanya saya mengajak dulu anggota dewan ke tempat atau lokasi program, sehingga

g dan bisa memahami tujuan dan sasaran program tersebut , sehingga pembahasan di *dean* menjadi lebih mudah ”.

(Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011 dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya).

Terkait aspek *context* hasil analisis instrumen yang disampaikan kepada responden, dapat dijelaskan bahwa program SD KLK memiliki tujuan agar anak-anak di Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah memperoleh pendidikan di Sekolah Dasar sampai tamat. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk membantu peserta didik menyiapkan diri secara psikologis, sosiologis dan akademis untuk mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Oleh sebab itu, pada dasarnya pelaksanaan SD KLK telah memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden secara umum Kepala SDN Dupak I dan Kepala SDN Banyu Urip III/364 telah mengetahui tujuan dari pelaksanaan program SD KLK. Hal ini cukup beralasan karena program SD KLK telah disosialisasikan secara luas baik kepada pengelola maupun stakeholder yang ada. Bahkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Aparat Pemerintah memahami betul program ini.

Petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan SD KLK, bahwa sasaran program SD KLK adalah anak-anak di Sekolah Dasar yang belum bersekolah atau putus sekolah di Indonesia. Sedangkan kriteria sasaran secara khusus ditujukan bagi anak-anak di 8 -14 tahun, belum bersekolah atau telah putus sekolah minimal 1 (satu) tahun karena alasan ekonomi, memiliki orang tua/wali dan tempat tinggal yang tetap, dan tergolong anak normal bukan anak berkelainan mental. Dilihat dari sasaran serta kriteria tersebut sangat jelas bahwa program SD KLK memiliki sasaran yang cukup jelas hal ini sangat membantu pengelola SD KLK dalam menentukan dan memilih peserta didiknya. Sesuai hasil informasi dari responden SDN Dupak I dan Kepala SDN Banyu Urip III/364 menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru memahami dan mengetahui sasaran serta kriteria peserta didik bagi program SD KLK, serta berpendapat bahwa program SD KLK dapat membantu

mengurangi jumlah anak putus sekolah dan meningkatkan angka belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Sedangkan ditinjau dari manfaat program terhadap keberhasilan dalam mentuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun informan dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru berpendapat bahwa program SD KKL akan membantu mempercepat tuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar.

Landasan hukum bagi pelaksanaan program SD KKL secara jelas telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat(1): Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 5 ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49: Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan". Berdasarkan landasan hukum tersebut maka program SD KKL memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan, memberikan kesempatan bagi anak-anak di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, serta legalitas terhadap orang tua yang wajib memberikan kesempatan bagi anak di sekolah untuk memperoleh pendidikan.

Kedua, dari segi input dalam pelaksanaan program SD KKL dapat ditinjau dari karakteristik sekolah, karakteristik guru, karakteristik siswa, kurikulum, sumber dana dan dukungan pemerintah daerah. Berikut akan wawancara dengan Eko Praningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Mengenai karakteristik sekolah Eko Praningih, mengungkapkan yaitu:

Kami laksanakan mulai dari rekrutmen Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dites tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi. Kemudian yang terpilih diundang melalui undangan dinas. Saya mengumpulkan Kepala

Sekolah sebelum di SK kan, jadi saya motivasi dulu, apakah kepala sekolah mau membantu program ini, sehingga berhasil. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, kemudian diperlakukan dengan tidak baik maka akan memperparah psikologinya anak, jadi program ini bukan hanya mengumpulkan anak-anak DO namun benar-benar untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga benar-benar mau sekolah". (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Selain itu, hasil karakteristik sekolah pelaksana program SD KLK yang diperoleh melalui analisis instrument diketahui bahwa karakteristik sekolah yang menjadi pelaksana program SD KLK ditinjau dari 3 (tiga) hal, yaitu (1) ketersediaan calon siswa KLK, (2) ketersediaan ruang kelas, dan (3) daya tampung kelas reguler. Hasil analisis terhadap ketiga indikator tersebut, disajikan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Calon Siswa Program SD KLK

Ketersediaan calon siswa KLK merupakan bagian penting bagi terlaksananya program SD KLK di suatu sekolah. Ketentuan yang ditetapkan adalah sekolah pelaksana program SD KLK harus memiliki minimal 20 siswa KLK. Oleh sebab itu, ketersediaan calon siswa menjadi salah satu kriteria sekolah pelaksana program SD KLK.

Berdasarkan data jumlah siswa KLK di SDN Dupak I dan SDN Banyu Urip III/364, tersebut diketahui bahwa masih banyak anak di sekolah yang memerlukan kelas khusus. Data ketersediaan calon siswa tersebut menurut pengelola SD KLK dijelaskan bahwa siswa KLK di SDN Dupak I sebanyak 24 dan SDN Banyu Urip III/364 sebanyak 22 siswa. Ditinjau keanggupan sekolah untuk melaksanakan program KLK, diketahui bahwa kedua sekolah anggap untuk menerima siswa KLK. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keanggupan sekolah menerima calon KLK cukup tinggi, sesuai dengan kemampuan pengelolaan dalam mencari calon siswa KLK, serta menunjukkan sekolah pelaksana program SD

KLK berada di lokasi dekat dengan konsentrasi anak-anak yang belum berskolah ataupun sekolah.

b. Ketersediaan Ruang Kelas

Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu kewajiban pengelola SD KLK untuk membuka KLK. Ketentuan sekolah yang akan melaksanakan program SD KLK harus memiliki minimal 3 (tiga) ruang kelas yang dapat dipergunakan untuk proses belajar mengajar KLK. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ruang kelas untuk pelaksanaan KLK di kedua sekolah menggunakan dari tiga ruang kelas. Hal ini dilakukan karena setiap sekolah menggunakan model pendekatan kelas kelompok A, B, dan C, dengan uraian bahwa Kelompok A digunakan oleh kelas 1 dan 2, Kelompok B terdiri dari kelas 3 dan 4, sedangkan Kelompok C digunakan oleh kelas 5 dan 6.

Setiap sekolah pelaksana program SD KLK menunjukkan bahwa semua gedung SD hanya digunakan satu sekolah. Sedangkan aktual pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran antara kelas reguler dan KLK setiap sekolah berbeda, yaitu semua sekolah penyelenggara KLK melaksanakan kelas reguler di pagi hari dan penyelenggaraan KLK dilaksanakan pada sore hari.

c. Daya Tampung Kelas Reguler

Selain ruang kelas dalam pelaksanaan SD KLK, bahwa hal penting lainnya adalah menyiapkan daya tampung kelas reguler sebagai tempat untuk siswa setelah dinyatakan layak untuk masuk kelas reguler. Oleh sebab itulah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon sekolah yang akan menyelenggarakan KLK adalah daya tampung kelas reguler.

Keadaan daya tampung siswa reguler untuk setiap sekolah cukup bervariasi. Daya tampung ini dilihat berdasarkan selisih antara daya tampung ruang kelas dengan jumlah siswa yang ada. Selisih tersebut menunjukkan seberapa besar daya tampung kelas reguler untuk dapat menerima siswa KLK yang akan masuk di kelas reguler.

Hal ini diperlukan agar siswa yang telah siap memasuki kelas reguler dapat terampung di kelas-kelas reguler saat ingkatan kelasnya. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki daya tampung yang cukup untuk menerima siswa-sisitanfer dari program KKK. Untuk mengantisipasi jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa dimungkinkan adanya hubungan (k) dengan sekolah lain untuk menampung siswa KKK yang akan ditangani di kelas reguler. Data ini menunjukkan bahwa setiap sekolah pelaksana KKK dapat memakamkan siswa KKK yang akan masuk di kelas reguler di sekolah lain yang terdekat jika di kelas reguler pada sekolah tersebut tidak dapat menampung lagi. Namun untuk sekolah yang tidak mempunyai k dengan sekolah lain karena pada sekolah tersebut masih cukup mampu untuk menampung siswa KKK yang akan masuk ke kelas reguler.

Karakteristik guru SD KKK merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan program SD KKK, Berikut petikan wawancara dengan Eko Prayningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“guru SD KKK harus memiliki pengalaman yang cukup karena mereka akan berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah di lingkungannya sehingga perlu memiliki kesabaran dan strategi yang tepat dalam menangani siswanya”

“Karena kepedulian kita kepada anak-anak, keberhasilan program ini tergantung pada guru-gurunya juga, karena biasanya anak DO itu disebabkan ada masalah di dalam” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang karakteristik guru SD KKK antara lain:

“guru SD KKK harus memiliki pengalaman PAUD, Kejar Paket, kelebihan dalam teknis pembelajaran, kesabaran, punya kemampuan cara mengajar

(Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami M sebagai Kepala Sekolah SDN Banyurip III/364, tentang karakteristik guru SD KKLK antara lain:

Guru dipilih oleh kepala sekolah, sesuai kemampuan guru (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Selain itu, sesuai karakteristik guru pelaksana program SD KKLK yang diperoleh melalui analisis instrumen diketahui bahwa karakteristik guru pada SD KKLK harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) berasal dari SD penyelenggara KKLK, (2) ditugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS), (3) berpengalaman mengajar di Sekolah Dasar minimal 5 (lima) tahun, dan lulus seleksi. Selain karakteristik tersebut guru KKLK telah dibekali dengan pelatihan, sehingga para guru tersebut telah siap untuk memberikan pembelajaran pada program SD KKLK. Jumlah guru KKLK yang terlibat pada setiap sekolah masing-masing 3 guru,

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui secara umum karakteristik guru KKLK cukup memadai untuk melaksanakan pembelajaran pada program SD KKLK. Walaupun masih ada yang berpendidikan SLTA namun ternyata didukung oleh lamanya pengalaman dalam mengajar, sehingga para guru tersebut telah memiliki kesiapan untuk memberikan pembimbingan dan pengajaran bagi siswa KKLK yang pada dasarnya memiliki karakteristik cukup heterogen.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada umumnya guru KKLK mengajar pada kelas reguler pada pagi hari, yaitu rata-rata mulai pukul 07.00 sampai dengan 12.30. Sedangkan pelaksanaan kegiatan mengajar pada program KKLK dilakukan pada siang hari. Pada umumnya semua guru yang mendapat tambahan beban tugas sebagai guru KKLK, tidak mengalami masalah, karena mereka dapat membagi waktu, serta telah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama.

Sedangkan guru non KLK merupakan guru yang mengajar siswa KLK di kelas reguler. Guru-guru tersebut memberikan pelajaran mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, ditambah guru agama dan pendidikan jasmani.

Karakteristik siswa SD KLK sebagai sasaran utama perlu diperhatikan sehingga sesuai dengan tujuan program SD KLK. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prayuningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Enggak, lah nanti kalau dibatasi gimana, kalau ternyata di lingkungan sekitar sekolah itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Tidak ada pembatasan karakteristik, sedangkan kalau dibatasi nanti gimana, karena untuk mencapai penuntasan drop out sehingga yang tidak terpenuhi oleh APBN dikasih melalui APBD. Memuntut anak-anak yang semula drop out supaya dapat kembali bersekolah.”

“Lingkungan SD Dupak itu kan lingkungan nggone yang rombeng-rombeng, kalau Banyuwirip itu kan nggone lingkungane yang nakal-nakal. Kalau kita kan bukan bagaimana menjaring murid banyak tetapi kalau memang disana ada murid yang drop out karena kasus keluarga, kasus sosial yang kaya begitu kan. Dimana ada anak-anak yang begitu bagaimana kita jaring, bukan kuantitasnya ya tetapi bagaimana kualitasnya” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banjip III/364, tentang karakteristik siswa SD KLK antara lain:

“Batas usia anak KLK yang ada umur 8 sampai dengan 14 tahun, sehingga membuat kami mesti cepat-cepat memasukan anak KLK yang usianya hampir 14 tahun ke dalam kelas reguler, sementara anaknya belum bisa beradaptasi dengan kelas reguler” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis instrumen yang diisi responden diketahui pada dasarnya karakteristik siswa program SD KLK, secara umum telah memenuhi kriteria seperti, yaitu: (1) berumur antara 8 sampai 14 tahun, (2) belum berskolah atau telah putus sekolah minimal 1 (satu) tahun karena alasan ekonomi, (3) memiliki orang tua/wali dan tempat tinggal tetap, dan (4) tergolong anak normal bukan anak berkelainan mental. Hal ini sesuai dengan data di SDN Dupak I dan SDN Banyuwirp III/364 diketahui bahwa semua siswa KLK yang direkrut/pengelola memenuhi kriteria tersebut.

Kurikulum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran pada program SD KLK, karena kurikulum menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Berikutnya wawancara dengan Eko Prayaningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang kurikulum program SD KLK.

“Kurikulumnya yang digunakan mengadopsi dari kurikulum yang dikembangkan Direktorat Pembinaan TK dan SD, kemudian kita tambahkan yang sesuai kondisi daerah, karena yang dari pusat itu umum, kalau disini ini sesuai dengan lingkungannya, karena psikologi anak itu kan berbeda contoh di daerah Tambora di daerah nelayan, di Wonokusumo berbeda, daerah Pegirian berbeda juga. Kurikulumnya tematik dan kepala sekolah mengembangkan sesuai tingkat kelasnya anak-anak, sesuai tingkat kelas berapa anak DO, melihat kasusnya anak per anak dulu, karena anak-anak kadang-kadang mengaku kelas 5 namun belum bisa apa-apa” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasty Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang kurikulum SD KLK antara lain:

“Kurikulum bertumpu ke kurikulum reguler dan bertumpu pada kemampuan siswa, ditambah kreativitas saya (guru) sendiri dengan life skill, sehingga mendapat kemampuan lebih untuk hidupnya. Selain itu pembekalan mental, keseimbangan antara materi pembelajaran dan bekal kehidupan siswa, serta kegiatan kurikuler tentang drama, musik, melibatkan pada acara pekan budaya, sehingga siswa punya kebanggaan untuk bangkit kembali, untuk motivasi siswa belajar” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Bangip III/364, tentang kurikulum SD KKL antara lain:

Sama dengan kurikulum reguler tapi perbandingannya kalau kurikulum reguler 100%, untuk yang KKL sekitar 60%. Sedangkan kelasnya menggunakan kelas rangkap, kelas 1,2 dan 3 satu kelas, kelas 4, 5 dan 6 satu kelas. Disini kita jadikan satu karena jumlah anaknya sekarang tinggal 16, hanya dikelompokkan, kebetulan kelas 6 juga tidak ada. Paling tinggi kelas 5, kita ikutkan tari, kalau ada anak-anak yang pagi, olahraga kita gabungkan biar tidak minder. Pramuka juga kita ikutkan sehingga nanti kalau kita regulerkan nggak merasa minder” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis terhadap responden guru tentang penggunaan kurikulum pada program SD KKL, bahwa kurikulum yang sama dengan kurikulum yang diberikan kepada siswa reguler dan kurikulum program SD KKL yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Hal ini memberikan otonomi terhadap gurudan sebagai upaya untuk mengejar taraf kesetaraan pengetahuan setiap siswa agar mampu beradaptasi di kelas reguler.

Untuk membantumeningkatkan kreativitas siswa program SD KKL, sebagian guru memberikan kegiatan tambahan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti: (1) kegiatan olah raga, (2) kegiatan pramuka, dan (3) kegiatan kesenian. Selain itu untuk memberikan kemampuan beradaptasi yang cukup terhadap setiap siswa

program SD KKL, maka pengelola mengikuti ~~is~~ program SD KKL beram a ~~is~~ reguler dalam bentuk kegiatan: (1) peringatan hari-hari bernasional, (2) upacara bendera, (3) kegiatan olah raga, dan (4) kegiatan lomba, namun ada juga beberapa pengelola yang belum mengikuti ~~is~~ program SD KKL dengan ~~is~~ regulernya.

Sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan program SD KKL terdiri dari dana APBN dan APBD. Namun pada penelitian ini fokus pada sumber dana APBD. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prastyo Hadi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang sumber dana program SD KKL.

“Sumber dana untuk program Kelas Layanan Khusus Sekolah Dasar ini dari dana APBD murni, tidak ada dari CSR atau pihak lain, murni APBD, sekolah gratis, jadi tidak ada apa-apa semuanya dari APBD, penyaluran dana ditransfer langsung ke sekolah, sedangkan untuk bantuan paket pakaian atau perlengkapan siswa dilelangkan karena jumlahnya banyak, anak-anak diukur bajunya, jadi pemenang lelang diberi ukuran, sekolah disuruh mendata.”

Anggaran tahun 2011, membuat anggaran untuk anak-anak yang tidak mampu membeli pakaian seragam anak-anak karena tahun 2010 ini saya sampai minta-minta untuk menangani kasus ini, termasuk yang gak bisa membayar uang sekolah, ijazahnya gak ketebus. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prastyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang sumber dana program SD KKL antara lain:

“Pendanaan seratus persen dari APBD, sementara belum menyentuh ke masyarakat, tapi kami mengharapkan solusi bersama dengan masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Bangip III/364 , tentang sumber dana program SD KKLK antara lain:

“pertama dari sekolahnya, baru diganti setelah masuk dananya. Bajunya Juli, peralatan baru Desember sehingga di talangi oleh sekolah dulu, diberikan plastik yang ada tutupnya dulu yang diisi buku, pen sil rautan. Dari masyarakat gak ada, karena gratis, jadi gak bera ni karena narik uang dah didatangi urtawan, sehingga gratis. ”

“Selain dari APBD juga memberikan alat tulis, baru kemarin malah kita dapat penggantian dari Dinas untuk seragam, kegiatan belajar mengajar sudah dari Maret, bajunya Juli baru dikasih. Peralatannya baru Desember, itu sekolah semua yang memberikan. Dari masyarakat gak ada, gak berani, disamping lingkungannya juga tidak mampu, dengan adanya dana BOS dan BOSDA juga sudah tidak boleh”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Berdasarkan hasil analisis instrumen dapat diketahui bahwa sumber dana penyelenggaraan program SD KKLK bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Kota Surabaya, selain itu telah dialokasikan dana pendamping untuk membantu pendanaan bagi siswa yang telah masuk kelas reguler, dan beberapa sekolah membantu siswa di kelas reguler berasal dari dana BOS. Dana penyelenggaraan KKLK yang diterima sekolah terdiri dari: (1) dana bantuan penyelenggaraan; dan (2) dana bantuan pembelian paket belajar siswa. Secara umum sekolah pelaksana KKLK telah menerima dana bantuan program SD KKLK. Dana penyelenggaraan merupakan dana tetap, sehingga benar-benar sama untuk semua sekolah. Dana penyelenggaraan ini dialokasikan untuk mengganti transportasi pengelola, buku perpustakaan, dan administrasi.

Pelaksanaan program SD KKLK tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari sumber dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program SD

KLK bersumber dari APBD Kota Surabaya. Berikut petikan wawancara dengan Eko Prasetyaningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Ketua Komisi D memberikan SMS data anak DO, ketua DPRD memberikan data dan aku langsung memverifikasi anak tersebut, dan menyampai ke Kepala Sekolah penyelenggara sekolah untuk mencari anak tersebut dan dimasukkan”

”in emang kepedulian lingkungan harus kita libatkan, termasuk Dewan, Ketua Komisi D itu sering SMS ke saya..”

Hasil analisis terhadap instrument yang diisi responden dapat diketahui bahwa pelaksanaan program SD KLK merupakan program yang dilaksanakan melibatkan berbagai instansi terkait. Untuk pelaksanaan di Kota Surabaya telah dijadikan program pembangunan pendidikan Kota Surabaya, dengan peran aktif Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai pembina. Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pembinaan berperan dalam melakukan supervisi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan KLK, serta memfasilitasi administrasi pelaksanaan KLK. Sedangkan dalam penanganan siswa KLK yang telah transfer di kelas reguler dilakukan dalam bentuk pantauan terhadap keberlanjutan kegiatan belajarnya.

Ketiga, dari segi proses dalam pelaksanaan program SD KLK dapat ditinjau dari aspek sosialisasi program, penentuan sekolah pelaksana KLK, rekrutmen siswa, dan pengelolaan program KLK. Sosialisasi pelaksanaan program SD KLK merupakan upaya menginformasikan program SD KLK bagi semua stakeholders pendidikan. Sasaran sosialisasi antara lain anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) tingkat II Kota Surabaya, aparat pemerintah (Camat dan Lurah), masyarakat guru, kepala sekolah, dan siswa-siswa. Sosialisasi ini selain mengenalkan program SD KLK, juga mengajak kepada semua pihak terutama orang tua siswa yang memiliki anak di sekolah dasar namun tidak bersekolah. Dalam pelaksanaan

sosialisasi dan pengelolaan program SD KLK, secara umum melibatkan guru-guru KLK, akan tetapi ada beberapa sekolah juga melibatkan guruNon KLK, dalam bentuk kegiatan rekrutmen siswa, membantumengajar di KLK, dan bimbingan belajar bagi siswa-siswa KLK.

Berikut peikan wawancara dengan Eko Praningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Daar DinasPendidikan Kota Surabaya tentang sosialisasi program SD KLK.

“Sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari RT, RW. Pelaksanaan sosialisasi ini kami laksanakan mulai dari rekrutmen Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dites tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi. Kemudian yang terpilih diundang melalui undangan dinas. Saya mengumpulkan Kepala Sekolah sebelum di SK kan, jadi saya motivasi dulu, apakah kepala sekolah mau membantu program ini, sehingga berhasil. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, kemudian diperlakukan dengan tidak baik maka akan memperparah psikologinya anak, jadi program ini bukan hanya mengumpulkan anak-anak DO namun benar-benar untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga benar-benar mau sekolah”.

“Sosialisasi kepada orang tua juga kita lakukan, karena ada anggapan ‘anakku terlanjur bodoh dadi gak usah tak sekolahno’ kita beri pengertian Pak nek anakmu ora sekolah trus njenengan mati itu nanti malah menjadi beban” akhirnya mereka sadar dan mau menyekolahkan anaknya ” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011)

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasty Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang sosialisasi program SD KLK dilakukan melalui:

turun ke lapangan menginformasikan ke masyarakat, menurut saya mudah-mudahan ini merupakan terobosan bagi pemerintah. Selain itu masyarakat

... dan lingkungan, dan guru menyampaikan informasi tentang program SD KLRK sekaligus disaat rekrutmen sehingga program ini dapat diketahui oleh masyarakat terutama para RT, RW maupun perangkat desa” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011)

Informasi dari Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyip III/364, tentang sosialisasi program SD KLRK antara lain:

Sosialisasi disampaikan kepada guru-guru di lingkungan sekolah, dan guru menyampaikan informasi tentang program SD KLRK sekaligus disaat rekrutmen sehingga program ini dapat diketahui oleh masyarakat terutama para RT, RW maupun perangkat desa” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011)

Dalam pelaksanaan rekrutmen siswa pada umumnya di setiap sekolah telah melibatkan guru KLRK dan kepala sekolah. Berdasarkan pendapat kepala sekolah menunjukkan bahwa dalam merekrut siswa KLRK pada umumnya melibatkan semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan. Komponen-komponen yang terlibat antara lain pengelola KLRK yang ada di sekolah, guru-guru KLRK dan juga guru-guru non-KLRK. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melibatkan semua unsur/komponen yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Lebih lanjut bahwa dalam rekrutmen siswa KLRK, sekolah juga melibatkan aparat pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar sekolah. Aparat pemerintah yang dilibatkan dalam rekrutmen siswa KLRK mulai dari aparat RT/RW, kepala desa/lurah dan camat. Selain itu warga dan tokoh masyarakat juga diminta informasi dan keterangannya tentang anak-anak di sekolah yang belum sekolah ataupun di sekolah. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang akurat tentang kondisi dan keberadaan anak-anak di masyarakat sekitar, sehingga dengan informasi dan data tersebut diharapkan semua anak-anak pada usia wajib belajar dapat bersekolah.

Beberapa metode yang dilakukan untuk rekrutmen siswa KLRK, antara lain: (1) Mencari siswa dari pintu ke pintu, (2) Meminta data ke RT/RW dan Lurah serta

mendatangi siswa tersebut, (3) Mencari siswa pada tempat-tempat mereka bekerja, (4) Membuat pengumuman dan menunggupendaftaran, dan (5) Minta informasi dari pemuka dan warga masyarakat. Cara-cara tersebut dirasa cukup efektif, sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan program SD KKL, dan terbukti dengan terpenuhinya kuota yang ditetapkan oleh setiap sekolah. Secara umum hampir semua guru KKL mengetahui tempat tinggal siswa KKL, serta adanya komunikasi dengan orang tua siswa yang sebagian besar dilakukan oleh guru KKL.

Berikut petikan wawancara dengan Eko Prayaningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang rekrutmen siswa program SD KKL.

“Saya sampaikan kepada kepala sekolah Pokoknya rekrut saja sebanyak - banyak karena untuk menuntaskan anak DO tersebut.” Contohnya ada Pak Camat yang bagus, Pak Camat Kenjeran. Pak Pomo itu ngirimkan terus siswa ke kita, kadang beliau membuat laporan ke saya bahwa telah menemukan anak calon siswa KKL sekian. Semua camat mendapat himbauan dari Walikota, Pak Walikota pada waktu kita presentasi kemudian membuat himbauan ke para camat. Memang kepedulian lingkungan harus kita libatkan, termasuk Dewan, Ketua Komisi D itu sering SMS ke saya menemukan anak disini” kemudian saya dari informasi Dewan itu memerintahkan Dinas ke alamat tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Sedangkan menurut informasi dari Hari Prasetyo Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang rekrutmen siswa program SD KKL dilakukan dengan cara:

“Guru beserta jajaran ke lapangan, lewat kelurahan, kecamatan diajak ke sekolah, turun ke lapangan secara langsung mendata sendiri dengan

Berikut petikan wawancara dengan Eko Pratomo sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang penyelenggaraan program SD KLIK.

Ada kebiasaan terkait kultur lingkungan, misalnya di sekitar SDN Tambakredi (APBN) setiap hari (musim sepak bola hilang mesti dicari -cari lagi)

Di daerah Pegirian kasusnya anak itu malam jumat mereka ilang kabeh soalnya mereka ngemis, mereka bawa air karena disitu ada makam, ngetutno orang yang mau nyekar, meskipun mau diganti uang nggak mau, ayo sekolah yuk nanti tak kasih uang, mereka enggak mau, karena orang tuanya juga begitu, Kamis minta agak siang, agak dini, karena sore sudah mulai kerja nguber-nguber orang yang ziarah, bersihkan rumput-rumput”

Pembiasaan, karena tuntutan orang tuanya, sekarang kalau kita bahas, siapa sih anak-anak kalau dilengkapi kebutuhannya, kebutuhannya akan sekolah, makannya dan sebagainya, kan semua anak kepingin. Kadang kalau melihat TV kan mereka melongo-melongo, karena mereka kepingin punya ini, punya ini, punya itu, punya sepeda, mereka kadang sampai ndlongop-ndlongop melongo-melongo, artinya dia juga pengen seperti itu. Itu keminderan yang terselubung menurut saya, suatu saat kalau anak-anak seperti itu, maka akan memuncak dan akan memprotes, dia dengan keadaannya sendiri manut-manut akan muncul sendiri ketika permasalahan itu sudah terlalu memuncak, akhirnya bisa menentang orang tuanya, anak-anak itu kan gak ada kata-kata sopannya. Dan anak-anak itu kan sama seperti orang dewasa, punya rasa stress, suatu saat menjadi orang dewasa menjadi orang pendendam, orang iri, orang dengki, karena sedari kecil dia merasa aku ini gak pernah enak dari kecil hingga dewasa, akan menyalahkan siapa saja, apa lagi jadi berhasil akan semena-mena, duniaku yang hilang gak akan kebeli dengan uang yang ada. Jadi bagaimana dunia yang ada jangan sampai hilang, sehingga mereka tidak merasa dunianya hilang. Suksesnya

ada banyak dunia yang hilang, mer eka merasa bahwa kamu enaknya sejak kecil aku kan baru sekarang. Orang berhasil tapi jinya masih jahat, iri dengki, menurut saya masih seperti itu. Makanya bagaimana caranya agar anak-anak itu tumbuh normal, masanya anak-anak y anak - anak, masanya remaja y remaja, masanya deusa y deusa, dia bisa merasa bahwa aku ini sudah deusa bukan menjadi anak -anak. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Menurut informasi dari Hari Prasty Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang pelaksanaan program SD KLK terkait sikap siswa, mengungkapkan bahwa:

Anak -anak masih mengikuti alur orang tua, jadi kalau bekerja gak sekolah, sehingga diberikan pengertian pembagian waktu” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Hal ini didukung oleh pendapat Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyurip III/3 64 terkait masalah sikap siswa dalam pelaksanaan program SD KLK :

Sulitnya m erubah sikap, moralnya, karena udah kelewat jadi susah. Banyak yang gak hadir, jadi kesepakatan nya 5 hari, 15.30 s.d 17.30. Siswa yang gak hadir maka Saya kerumahnya, enteng jawabnya malas, orang tuanya menikah lagi, padahal udah di kasih baju, dan sepatu” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Model pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru umum ny mengikuti model rangkap kelas sesuai juknis program SD KLK, yaitu Kelas A untuk kelas terdiri atas kelas I dan II, Kelas B terdiri atas kelas III dan IV, dan Kelas C terdiri dari kelas V dan VI. Dari hasil observasi di SDN Dupak I dan SDN Banyurip III/364 menunjukkan bahwa kedua sekolah merujuk pada aturan tersebut. Seorang guru memegang dua kelas sesuai model kelas paralelnya. Dalam proses pelaksanaan

kegiatan pembelajaran untuk SD KKK, setiap guru pada umumnya menggunakan kelas terpisah sedangkan lainnya. Jumlah guru yang terlibat dalam kegiatan KKK ini setiap sekolah ditunjuk 3 orang guru, sedangkan jumlah siswa disesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan, namun tidak ada pembatasan kuota. Kegiatan pembelajaran pada siang hari sampai sore hari di luar jadwal kegiatan belajar mengajar kelas reguler. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu.

“Kelasnya menggunakan kelas rangkap, kelas 1,2 dan 3 satu kelas, kelas 4, 5 dan 6 satu kelas. Disini kita jadikan satu karena jumlah anaknya sekarang tinggal 16. Hanya dikelompokkan, kebetulan kelas 6 juga tidak ada. Paling tinggi kelas 5”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Untuk membantu meningkatkan kreativitas siswa KKK, sebagian guru memberikan kegiatan tambahan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti: (1) kegiatan olah raga, seperti pingpong, (2) kegiatan pramuka, dan (3) kegiatan kesenian, seperti senam lantai dan tari.

“Rencana kedepan akan bekerjasama dengan universitas, dari ITS Bina Lingkungan (Tunas Hijau) untuk pencinta alam, setelah pagelaran seni, sehingga anak-anak dapat mengenal lingkungannya” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Dupak I).

“Kita ikutkan tari, kalau ada anak-anak yang pagi, olahraga kita gabungkan biar tidak minder. Pramuka juga kita ikutkan sehingga nanti kalau kita regulerkan nggak merasa minder gitu loh” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyu Urip III/364).

Terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada KKK dalam bentuk (1) kemampuan siswa yang rendah dalam kemampuan membaca,

menulis dan berhitung, (2) kurang disiplin dalam belajar, baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, maupun dalam membuat PR, dan (3) lemahnya dalam mengikuti pembelajaran sehingga memerlukan kegiatan pembelajaran remedial dan keabsahan dalam memberikan pembelajaran.

“Memberi pengarahannya untuk telaten, kalau gak kita yang memperhatikan susah karena orang tuanya dari dulu kurang perhatian terhadap pendidikan, lebih baik jualan membantu orang tua”

“Kalau mereka gak masuk 2 atau 3 hari didatangi kerumahnya, karena malu, karena ketemu temen lama, badannya besar, akhirnya dibujuk untuk masuk lagi”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyuwangi III/364).

Pelaksanaan pengalihan siswa KKK ke kelasreguler dilakukan setelah siswa KKK dinyatakan layak dan mampu untuk masuk di kelasreguler. Proses pengalihan siswa KKK ke kelasreguler dilaksanakan berdasarkan pengamatan dan tes Bentuk tes yang dilaksanakan meliputi tes menulis berhitung dan membaca. Sedangkan pengamatan yang dilakukan untuk meliputi perubahan sikap, motivasi dan minat siswa KKK untuk belajar lebih baik. Kemudian guru KKK dan non KKK juga berperan untuk memperkenalkan siswa KKK memasuki kelas reguler dan memperlakukannya sama dengan siswa lainnya.

Pelaksanaan kegiatan KKK memerlukan pengelolaan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lainnya. Dalam pengelolaan keuangan sekolah hanya menerima uang transportasi sedangkan paket belajar diterima dalam bentuk barang. Hal ini seperti disampaikan oleh Eko Prayuningsih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“gak ada honor Guru dan Kepala Sekolah hanya transport Rp.25.000,-/hari efektif, jadi 25 hari efektif kali Rp25.000, 5 Guru + 1 Kepala Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah sama”

Problematika lebih pada disesuaikan dengan keadaan daerah, Memberikan dana sekian harus lelang, honor gak boleh, hanya bentuk transport, koordinasi dengan UPLK guru dan Kepala Sekolah”

“Diberi paket pakaian seragam lengkap semuanya, alat tulis buku pensil. Anak-anak diukur, didata kemudian datanya diserahkan kepada pemenang lelang”. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011)

“paket belajar di kasih dari dinas, laporan ke dinas. Untuk difoto aja mesti dirayu,

Ukuran baju siswa, ini arsipnya, (lengkap buku, penggaris, rautan, pinsil, buku gambar)

Ini barang-barang yang kami belikan lengkap, alat tulis, penggaris, rautan, gunting, sumbangan dari guru-guru. Agar mereka kerasan” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyuwangi III/364).

Mekipun program SD KKL telah berjalan cukup efektif oleh sekolah penyelenggaraan KKL, namun masih menyimpan beberapa kelemahan dan kendala. Oleh karena itu, berikut ini diuraikan beberapa kendala, harapan dan saran terhadap penyelenggaraan KKL baik yang dijangkau dari guru maupun kepala sekolah penyelenggara KKL.

1). Kendala

Kendala yang dirasakan dan terjadi di sekolah dalam penyelenggaraan KKL dapat dirangkum sebagai berikut:

a). Berkaitan dengan Siswa

- 1) Kehadiran ~~siswa~~ dan minat belajar ~~siswa~~ kurang optimal,
- 2) Anak ~~yang~~ memiliki pekerjaan pagi hari tidak bersedia di transfer ke kelas pagi (reguler),
- 3) Siswa ~~yang~~ telah berada di kelas tinggi merasa bosan mengikuti pelajaran kelas rendah;
- 4) Siswa ~~selalu~~ merasa cepat bosan dan lambat menerima pelajaran,
- 5) Konsentrasi ~~siswa~~ masih labil dan sering cepat merasa terganggu,
- 6) Keinginan belajar masih rendah, kurang percaya diri sehingga sangat mengganggu dalam penyampaian pelajaran.

b). Berkaitan dengan Orang Tua Siswa

- 1) Kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak ~~di~~ pendidikan dasar ,
- 2) Tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga sering pindah-pindah tempat tinggal yang dapat mengganggu pelaksanaan pembelajaran siswa,
- 3) Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah

c). Berkaitan dengan Pengelola KKK

- 1) Materi pelajaran tidak terselesaikan sesuai jadwal,
- 2) Keberlanjutan pendanaan KKK di kelas reguler yang masih kurang,
- 3) Guru KKK yang tidak berasal dari sekolah penyelenggara menyulitkan koordinasi, terutama guru Non KKK,
- 4) Terbatasnya ruang kelas serta sarana olahraga yang tersedia,
- 5) Sulitnya menentukan penempatan siswa ~~di~~ di kelas reguler

2). Solusi

Beberapa solusi yang telah dilakukan pengelola dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan KLK, antara lain:

1. Membuat peraturan dan penjelasan tentang pentingnya disiplin dalam belajar,
2. Melakukan kunjungan rumah bagi siswa yang tidak hadir dan memberikan penjelasan terhadap orang tua siswa,
3. Memberikan dukungan dan memotivasi siswa melalui pendekatan secara sabar dan penuh kasih sayang,
4. Mengalokasikan berbagai bantuan dan berbagai sumber pendanaan pendidikan terutama BOS,
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua siswa akan pentingnya pendidikan,
6. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa.
7. Memberi kesempatan dan mengupayakan keterlibatan guru-guru non KLK,
8. Memberikan pengertian dan penjelasan secara transparan tentang keuangan kegiatan KLK

3). Harapan

Beberapa harapan dan saran yang diajukan guru dan kepala sekolah untuk perbaikan proses penyelenggaraan KLK dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dana pendidikan untuk KLK yang telah masuk kelas reguler tetap di biayai sampai tamat sekolah dasar,
- 2) Program KLK tetap dipertahankan dan kesejahteraan pengelola KLK lebih ditingkatkan pada masa-masa mendatang,
- 3) Program KLK dapat dilaksanakan dengan baik tidak hanya 3 tahun tapi lebih dari itu sehingga terjadi proses yang berkelanjutan,

- 4) Dalam penentuan sekolah sesuai dengan tujuan pelaksanaan KLK maka pemilihan sekolah harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,
- 5) Perlu dikembangkan pelatihan bagi guru non KLK dalam pola penanganan siswa KLK di kelas reguler,
- 6) Perlu diupayakan semaksimal mungkin agar siswa KLK tidak mengalami putus sekolah kembali,
- 7) Perlu dikembangkan bentuk KLK bagi pendidikan sekolah lanjutan smp.

Hal ini diungkapkan pula oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, melalui Eko Prasningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Harapan saya ke depan walaupun tanpa melalui KLK seperti ini kalau ada anak-anak yang drop out, semua sekolah itu langsung tanggap, kan begitu, ini kan karena kita kan program saja. Jangan sampai ada orang tua ataupun anak yang takut sekolah karena dia punya masalah. Walaupun tanpa KLK, sekolah tanggap, tanpa kita cari, tidak perlu lapor dinas, jangan sampai ada anak, orang tua menyebabkan tidak sekolah karena anak yang tidak sekolah pasti bermasalah, harapan saya seperti itu pendidikan dapat terwujud karena itu hak anak-anak. Harapan saya kedepan kepedulian terhadap anak-anak itu besar, terutama guru-guru. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Harapan Hari Prasty Hadi sebagai Kepala Sekolah SDN Dupak I, tentang pelaksanaan program SD KLK, mengungkapkan bahwa:

“KLK tidak putus bagi penuntasan putus sekolah, Munculkan KLK tingkat SMP agar wajib belajar tuntas, supaya tidak terlantar lagi. Kesiambungan KLK SD ke SLTP”

“Anak-anak yang kurang mampu, dikawal sampai SMP, SMA, dan PT. ”

“Pemerintah dapat memudahhi anak-anak yang memiliki kemampuan spesifik dapat terarahkan untuk membina anak-anak tersebut” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Sedangkan Sri Utami sebagai Kepala Sekolah SDN Banyurip III/3 64 menyampaikan harapannya bagi pelaksanaan program SD KLK, seperti petikan wawancara berikut:

“Program ini akan berjalan terus karena melalui program ini anak-anak bisa mendapat kesempatan sekolah lebih tinggi.”

“KLK itu nantinya dapat menamatkan sekolah, dan anak-anak dapat belajar dengan senang. Ada hal-hal kecil yang perlu diperhatikan seperti gak punya rapor. Bantuan untuk anak-anak kurang, sehingga perlu pemikiran tentang penambahan biaya untuk anak-anak. Pemerintah gak mendanai operasional, yang APBD hanya transpor saja, pakaian anak-anak yang besar-besar gak muat sehingga diupayakan dari BOS, untuk beasiswa miskin perlu dipikirkan bagi anak-anak KLK”.

“Anak-anak KLK bisa masuk dalam pendanaan BOS karena sekarang ini kan kami nggak dapat Paket Bantuan Operasionalnya.” (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011).

Keempat, dari segi produk dalam pelaksanaan program SD KLK dapat dilihat berdasarkan aspek jumlah siswa di kelas reguler, tingkat adaptasi siswa di kelas reguler, dan prestasi siswa di kelas reguler. Tingkat keberhasilan program SD KLK, secara baik dapat ditinjau dari aspek penuntasan siswa dari putus sekolah sehingga dapat kembali mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Hal ini seperti diungkapkan Eko Praningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang keberhasilan program SD KLK di Kota Surabaya.

“Tingkat keberhasilan bukan jumlahnya, namun bagaimana lingkungan tersebut dari banyak DO menjadi tidak ada DO, sehingga memang menekan angka DO di lingkungan tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2011).

Uraian hasil analisis terhadap dimensi produk dengan berbagai aspek disajikan sebagai berikut:

1) Jumlah siswa di kelas reguler

Pelaksanaan program SD KKL mampu mengantarkan siswa memasuki kelas reguler hingga dapat dipertahankan hingga lulus pendidikan dasar. Siswa-siswa tersebut secara umum dapat ditangani dengan baik oleh guru-guru di kelas reguler, karena mereka mampu menyamakan diri dengan siswa lain di kelas reguler. Dilihat dari tingkat kehadiran mereka cukup tinggi kehadirannya, walaupun masih sekali tidak hadir, namun selalu ada keterangan. Hal ini menunjukkan mereka telah mampu menyamakan diri dengan lingkungan kelasnya dan keadaan tersebut menunjukkan mereka mampu bertahan hingga lulus.

Berdasarkan informasi pelaksana program SD KKL diketahui berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dialami siswa. Namun pada dasarnya dapat ditangani sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi. Secara umum masalah dialami siswa adalah masalah psikologis belajar. Dalam hal ini, guru memberikan solusi dengan sabar membantu siswa dalam pembelajarannya. Demikian juga bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar karena akibat kurang dapat mengikuti pelajaran serta akibat sulit bicara dan membaca. Sedangkan untuk mengatasi masalah siswa yang pernah DO kurang dari 1 tahun dilakukan dengan pemberian semangat bagi siswa untuk tetap belajar. Juga dilakukan pendekatan dengan memberi pengertian pada orang tua siswa agar selalu berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Pendekatan dengan orang tua siswa

dilakukan saat itu pertemuan di sekolah atau dengan mendatangi rumah siswa yang bermasalah. Masalah lain yang dihadapi siswa KKK akibat kurang mampunya orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya akibat kondisi ekonomi. Pada umumnya guru dapat mengatasi masalah yang terjadi bagi siswa yang bermasalah pada sekolahnya.

Ada bujukan, sebenarnya dia mampu, Cuma karena badannya besar jadi dia malu, kalau ke sekolah pakai jaket, nggak pede. Sudah DO kurang lebih satu tahun, kelas 5, sehingga dia hanya tinggal di rumah nggak ada kegiatan, kita ajak Alhamdulillah dia mau, ya Cuma itu kita harus terus memberikan motivasi. Ada anak namanya Ajeng, cerdas, sudah kita regularkan tapi sayang dia mesti bekerja membantu nafkah orang tuanya. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2011 dengan Kepala Sekolah SDN Banyuwangi III/364).

2) Tingkat adaptasi siswa KKK dalam Kelas Reguler

Secara umum siswa program SD KKK dapat menyesuaikan diri dengan siswa reguler setelah bergabung dalam kelas (kelompok belajar). Hal ini terjadi karena para siswa masih memiliki umur yang relatif muda (siswa SD) dan mudah bergaul atau sama lainnya. Siswa KKK ditempatkan pada kelas reguler dilakukan berdasarkan kemampuan akademisnya, dengan pertimbangan psikologis siswa.

Siswa KKK yang masuk kelas reguler masih terus dalam pengawasan guru KKK, agar dapat beradaptasi dengan siswa reguler dan dapat mengikuti pelajaran agar tidak tertinggal jauh dengan kemampuan siswa reguler. Pada umumnya kehadiran siswa KKK pada kelas reguler tidak mengganggu proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa KKK memiliki semangat yang kuat untuk menambah ilmu (belajar). Kemudian berdasarkan pendapat guru non KKK menunjukkan bahwa siswa KKK cukup disiplin dalam belajar sudah masuk pada kelas reguler.

Demikian juga bila ditinjau dari segi psikologis lainnya seperti: ketekunan dalam belajar, motivasi belajar dan sikap serta tirakat siswa KLK relatif baik dibandingkan dengan siswa reguler. Hal ini menunjukkan bahwa siswa KLK tidak tertinggal dibandingkan siswa reguler, bila diberi kesempatan untuk belajar. Bila ditinjau dari segi kemampuan akademis siswa KLK, berdasarkan pendapat guru non KLK menunjukkan bahwa kemampuan akademis siswa KLK sama dengan kemampuan siswa reguler. Dalam pengelolaan siswa KLK, hampir tidak ada hambatan yang dijumpai guru dengan memasukkan siswa KLK pada kelas reguler.

Kemarin aku datangkan ketua dewan pendidikan, kerjasamanya dengan Ansori yang menangani anak-anak gelandangan, rumah singgah, anak itu dulu pengamen saya sering mampir kesitu dulu sekedar membawakan nasi goreng, mengobrol, biar dekat. Anak itu sekolah terus sampai kuliah, kalau kadang sering minjem duit ke saya, sekarang dia sudah jadi Guru, jadi sekarang saya suka minta tolong ke dia, mas aku di bantu ya, sampeyan agar memotivasi Guru-Guru biar semangat dalam mendidik. Guru-guru diajak ke rumah, dimotivasi, jadinya akrab, ada kegiatan keluarga, dia pinter nyanyi campur sari pinter, dia punya teman-teman pengamen. (Hasil wawancara dengan Eko Prasningih sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 10 Januari 2010).

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian bahwa untuk penilaian terhadap bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD menggunakan pendekatan evaluasi program model CIPP yaitu *Context*, *Input*, *Proses*, dan *Product*. Berikut ini butir-butir penjelasan terkait penilaian terhadap implementasi program SD KLK di Kota Surabaya.

5.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah, secara berjenjang baik kepada pihak instansi terkait seperti DPRD, UPTD Kecamatan, maupun pihak sekolah pelaksana program SD KLIK. Kegiatan sosialisasi bagi kepala sekolah dilakukan sekaligus dengan rekrutmen sekolah penyelenggara dengan melakukan tes (interview) kepada para kepala sekolah yang akan dipilih sebagai kepala sekolah pengelola tanpa mereka mengetahui bahwa mereka sedang diseleksi, serta untuk mengetahui kepedulian mereka terhadap pendidikan, anak-anak terlantar/anak-anak kurang beruntung.

5.2.2 Rekrutmen Siswa

Pada dasarnya dalam pelaksanaan rekrutmen siswa, Dinas Pendidikan tidak memberikan bantuan untuk jumlah, asal siswa, dan tempat asal siswa. Dinas Pendidikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar setiap siswa yang Drop Out bisa kembali ke sekolah. Sedangkan cara rekrutmen dilakukan secara luas melalui perangkat aparat pemerintahan : baik RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai Walikota, bahkan anggota DPRD.

5.2.3 Dana Bantuan

Dana bantuan untuk program SD KLIK dianggarkan dari APBD. Namun bantuan ini disampaikan ke sekolah berupa Paket belajar lengkap (sragam, tas, sepatu, buku, alat tulis), sedangkan bagi guru kepala sekolah berupa transportasi.

Berkaitan dengan kebutuhan biaya terhadap siswa sekolah dasar kelas layanan khusus khususnya yang ada di Kota Surabaya yang dibiayai menggunakan dana APBD Kota Surabaya masih banyak kekurangan dari kebutuhan biaya ideal yang dibutuhkan oleh sekolah dasar penyelenggara program kelas layanan khusus. Di dalam penyelenggaraan sekolah dasar kelas layanan khusus di Kota Surabaya,

bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya berupa honor pengganti transportasi bagi Kepala Sekolah dan Guru masing-masing sebesar Rp.25.000/hari. Idealnya sebagai siswa-siswa yang tertinggal pelajaran karena masalah ekonomi dan psikologis sosial maka seharusnya ada bantuan biaya yang mencakup makanan tambahan sebagai penunjang kecukupan gizi siswa, ada sarana prasarana berupa multi media maupun laboratorium bahasa, komputer maupun laboratorium pembinaan ~~ek~~ sesuai minat dan bakat mereka yang bisa berguna bagi hidup mereka kelak sehingga bisa hidup mandiri tidak menjadi beban bagi orang lain.

5.2.4 Kurikulum

Dinas Pendidikan hanya memberikan arahan kepada Kepala Sekolah agar mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat kelas anak-anak. Kurikulum sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya mengikuti kurikulum yang berlaku pada sekolah regular, yaitu kurikulum dari Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, ditambah dengan ~~la~~ (muatan daerah) yang sesuai dengan lingkungan dimana Sekolah Dasar Kelas Layana Khusus berada. Kurikulum yang ada di Sekolah Dasar wilayah perkotaan berbeda dengan kurikulum yang ada di lokasi pantai (nelayan) disesuaikan dengan psikologis anak. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang tematik dengan melihat kasus anak sebelumnya lebih dahulu (penyebab drop outnya) bisa karena problem keluarga, ekonomi, kekerasan, pelecehan dan kasainnya.

5.2.5 Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program SD KLK, pada dasarnya adalah untuk mengembalikan anak drop out, dengan alasan berbagai faktor baik ekonomi, geografis dan maupun keluarga untuk dapat kembali ke sekolah hingga menyelesaikan sekolahnya. Namun sesuai dengan misi pembangunan Kota Surabaya, menentukan tingkat keberhasilan melalui bagaimana agar disekitar sekolah tidak ada anak yang putus sekolah. Jadi tingkat keberhasilan program ini tidak didasarkan pada

banyaknya sekolah mereka siswa KKK tetapi berdasarkan jumlah siswa putus sekolah yang ditanyakan oleh sekolah penyelenggara (angka putus sekolah yang turun di sekitar lokasi sekolah) .

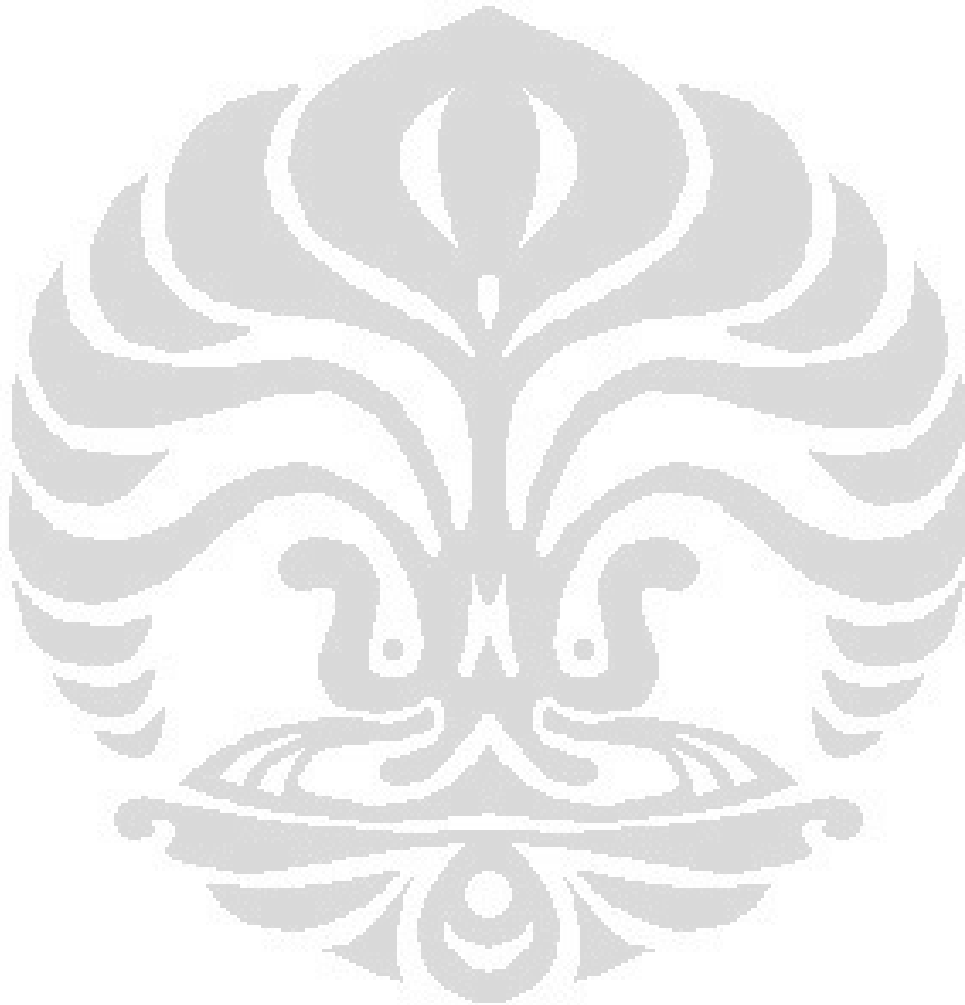
5.2.6 Hambatan

Program SD KKK di Kota Surabaya telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan menggunakan dana APBN, dan sejak tahun 2005 telah dicoba diaplikasikan melalui dana APBD. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program SD KKK ini, antara lain: hampir semua anak-anak KKK adalah anak-anak yang mengalami putus sekolah karena masalah ekonomi, kebanyakan dari mereka berasal dari masyarakat urban yang bermata pencaharian tidak tetap sehingga kebanyakan dari mereka diberdayakan oleh orang tua mereka untuk membantunya mencari nafkah misalnya pada hari Kamis atau malam Jumat biasanya anak-anak tidak masuk sekolah karena anak-anak pergi ke makam untuk menjadi pengemis miman, menjual air yang dibutuhkan oleh para pejalan kaki, menjual bunga dan menjual untuk membersihkan makam bagi para pejalan kaki. Hambatan lain adalah faktor lingkungan tempat tinggal mereka yang membuat mereka tidak sadar akan pentingnya pendidikan, misalnya lokasi SD Dupak adalah disebutkan oleh Eko Praningih (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya - lokasi orang-orang rombeng-rombeng (pemulung) sedangkan lokasi SD Banyuwir dekat pada lokasi pelacuran (PSK).

Adanya anggapan yang salah dari orang tua yang menganggap anaknya terlanjur bodoh sehingga menganggap percuma saja disekolahkan juga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan model pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus. Banyak orang tua dari para siswa KKK tidak menganggap penting pendidikan bagi anak-anak mereka.

Solusi terhadap hambatan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan terhadap para orang tua siswa KKK di Kota Surabaya agar pemahaman mereka bahwa apabila anak yang dianggap bodoh tadi tidak disekolahkan maka justru akan menjadi beban dikemudian hari. Sosialisasi atau pemahaman juga sering diberikan

pihak Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah, Guru -Guru KKL, aparat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat kepada orang tua siswa KKL agar mereka sadar bahwa pendidikan juga merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki nasib dan memperbaiki kehidupan.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis evaluasi pelaksanaan program Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus di Kota Surabaya yang telah diuraikan sebelumnya, sesuai pendekatan teori CIPP, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program SD KLK telah meningkatkan motivasi dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru untuk membantu siswa-siswa baik di kelas KLK maupun kelas reguler. Siswa program SD KLK di kelas reguler sebagian besar dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas reguler yang membuktikan tingkat adaptasi dan percaya diri mereka yang sudah pulih. Oleh sebab itu, siswa KLK di kelas reguler mampu bersaing dengan siswa - siswa lainnya. Pemilihan sekolah yang tepat sebagai tempat pelaksanaan program SD KLK di Kota Surabaya juga mendukung keberhasilan program ini. Kurikulum dan materi belajar yang diberikan, ditambah berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu para siswa KLK mengikuti pelajaran dengan baik. Kegiatan ekstra kurikuler yang diberikan juga dapat menciptakan kestabilan mental, sehingga rasa percaya diri anak-anak KLK juga kembali tumbuh dengan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah guru KLK yang berjumlah 5 orang per sekolah merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya betul-betul menyeleksi langsung para Kepala Sekolah dan guru calon penyelenggara SD KLK sehingga terpilih para Kepala Sekolah dan guru yang

mempunyai kepedulian tinggi terhadap pentingnya pendidikan khususnya pendidikan bagi anak-anak kurang beruntung, sehingga walaupun biaya yang diberikan oleh pemerintah kota hanya sebatas pengganti transport bagi Kepala Sekolah dan Guru pelaksana program KLK mereka tetap semangat dalam melaksanakan model pendidikan ini. Kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Aparat Pemerintah membuat Program SD KLK di Kota Surabaya dapat berjalan dengan sangat baik. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan tes wawancara kepada para calon pengelola SD KLK sehingga sekolah yang direkrut betul-betul sekolah yang memahami dan peduli terhadap pendidikan. Rekrutmen siswa di setiap sekolah selain melibatkan guru KLK dan kepala sekolah, juga melibatkan aparat pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar sekolah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program KLK yang sudah berjalan dengan baik ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelayanannya, juga ditingkatkan sebarannya sehingga anak-anak yang putus sekolah dasar dapat dilayani dengan baik, tidak hanya bagi anak-anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar namun juga bisa diimplementasikan pada jenjang yang lebih tinggi sehingga bisa menjadi program yang berkelanjutan. Para Kepala Sekolah dan guru KLK juga perlu diberi pelatihan dan workshop pembelajaran secara rutin sehingga mempunyai kemampuan membentuk aspek mental dan sosial bagi siswa-siswa KLK untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan mengantarkan siswa-siswa tersebut kembali ke kelas reguler dan lulus sekolah dasar.

2. Hampir semua siswa KLK putus sekolah karena persoalan ekonomi, kesadaran orang tua mereka sangat kurang terhadap pentingnya pendidikan sehingga perlu ada upaya untuk memberdayakan komite sekolah untuk membina para orangtua siswa KL, dengan begitu Kepala Sekolah dan para guru penyelenggara Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dapat berkonsentrasi pada aspek pengajarannya. Dari segi aspek pembiayaan karena terbatasnya dana maka Pemerintah Kota Surabaya c.q Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu memperluas kerjasama pengelolaan Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus dengan banyak pihak, misalnya dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan juga bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Komisi Perlindungan Anak karena permasalahan anak-anak KLK harus bisa ditangani secara *komprehensif* dan menyeluruh sehingga seluruh aspek masyarakat bisa lebih terlibat dan berpartisipasi pada pemerataan akses pendidikan.

REFERENSI

- Anderson, James E. 1978, *Public Policy Making*, Second Edition, New York Praeger Publishers
- Baker ET., Wang, MC., & Walbeg, HJ., 1995, The Effect of inclusion on leaning. *Education Leadership*
- Depdiknas, 2010, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*, Jakarta: Depdiknas 2010.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Second Edition, New Jersey
- Dy, Thomas R, 1972, *Understanding Public Policy*, New Jersey Englewood Cliffs, Prentice Hall
- Eaton, David, 1985, *The Political System*, New York, Alfred A. Knopf
- Edwards, George E and Ira Shkavsky 1978, *The Policy Predicament*, San Francisco, W.H. Freeman
- Friedrich, Carl J, 1963, *Man and His Government*, New York, McGraw Hill
- Gebon, L.N., 1992, *Public Policy Making In A Democratic Society : A Guide To Civil Engagement*, New York, M.E. Sharpe Inc.
- Howlett Michael and M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*, New York, Oxford University Press
- HeyWidayono, dkk. *Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus dan yang Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusbang Kandik Balibang Depdikbud, 1997.
- HeyWidayono. *Penyelenggaraan Sekolah Unggul: Landasan Yuridis, Filosofis, dan Konseptual*. Jakarta: Program Pascasarjana IKIP Jakarta, 1993.
- Jones, Charles O. 1984, *An Introduction to The Study of Public Policy* Third Edition, Monterey Cole Publishing Company
- Laßl, Harold. D and Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society* Yale University Press
- Joint Committee, 1991, *Standards for Evaluation of Educational Programs , Projects and Materials*
- Nakson, S. 1982, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bina Aksan, 1982
- Nasoeton, Andi Hakim. *Anak Berbakat dan Kemungkinan Menemukannya di Indonesia*. Jakarta: C.V. Raja Ali, 1982.

- Nakama, R.T and F. Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York, St Martin's Press
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*. Jakarta : PT. Elm Media Komindo Kelompok Gramedia
- ONeil, J, (1995) Can inclusion work? A Conversation with James Kauffman and Mary Sapon-Shevin, *Education Leadership*,
- Paker RS. 1975, *Policy and Administration in Australia: A Guide*, Sydney John Wiley and Sons
- Pressman, Jeffrey L. And Aaron Wildavsky 1984, *Implementation How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*, Third Edition, California, University of California Press
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang MPR RI Periode 1999-2004*, Buku II Penandingan Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi
- Stainback, William, 1992, *Contraversial Issues Confronting Special Education*, Allyn and Bacon: Simon & Schuster Inc, USA.
- Staub, D dan Peck, C.A., 1995, What are the outcomes for nondisabled students?, *Education Leadership*,
- Suharsimi Aikunto, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunardi, 2003, *Menuju Pendidikan Inklusif*, Bandung, Dijen Dikti
- Stufflebeam, Daniel L and Anthony J. Shinkfield, 1984, *Systematic Evaluation : A Self Instructional*, Boston, Kluwer -Nijhoff
- Tajibnapis, Fairda Yusuf, 2000, *Evaluasi Program*, Jakarta, Rineka Cipta
- Vaghn, S., Bos , C.S. & Schumn, J.S., 2000, *Teaching Exceptional, Diverse, and a Risk Student in the General Educational Classroom*, Boston: Allyn Bacon.
- Wadhani dan Juliaha, *Pemantapan Kemampuan Mengajar: Buku Materi Pokok*. (Jakarta: Pustaka Penebitan UT, 2002), p32